



**PEMETAAN KETIMPANGAN WILAYAH DENGAN  
MENGUNAKAN ANALISIS KLASSTER DAN STRATEGI  
PENANGGULANGANNYA DI JAWA TIMUR**

**TESIS**

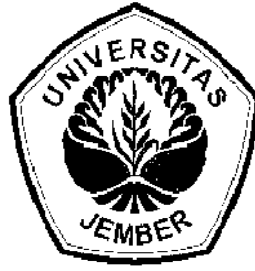
Oleh

**RONI SETIAJI  
NIM 140820201012**

**MAGISTER ILMU EKONOMI  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**





**PEMETAAN KETIMPANGAN WILAYAH DENGAN  
MENGUNAKAN ANALISIS KLASTER DAN STRATEGI  
PENANGGULANGANNYA DI JAWA TIMUR**

**TESIS**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Ekonomi (S2)  
dan mencapai gelar Magister Sains

Oleh

**RONI SETIAJI**  
**NIM 140820201012**

**MAGISTER ILMU EKONOMI  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**



**PERSEMBAHAN**

Tesis ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Sujati dan ayahanda Sukardji yang tercinta;
2. Bapak dan Ibu guru-guruku;
3. Istri dan anak-anakku yang tercinta.



**MOTO**

Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.

(terjemahan Surat Ibrahim ayat 7)<sup>\*)</sup>

---

<sup>\*)</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. 1989. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Mahkota.

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roni Setiaji

NIM : 140820201012

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “Pemetaan Ketimpangan Wilayah Dengan Menggunakan Analisis Klaster Dan Strategi Penanggulangannya Di Jawa Timur” adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Desember 2016

Yang Menyatakan

**RONI SETIAJI**  
NIM. 140820201012

TESIS

PEMETAAN KETIMPANGAN WILAYAH DENGAN  
MENGUNAKAN ANALISIS KLASSTER DAN STRATEGI  
PENANGGULANGANNYA DI JAWA TIMUR

Oleh

RONI SETIAJI  
NIM 140820201012

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Zainuri, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes

**LEMBAR PENGESAHAN**

Tesis berjudul : Pemetaan Ketimpangan Wilayah dengan Menggunakan Analisis  
Klaster dan Strategi Penanggulangannya di Jawa Timur

Hari / Tanggal : 28 Desember 2016

Tempat : Ruang Ujian Gedung Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi  
Universitas Jember

**TIM PENGUJI**

Ketua

Dr. Moh. Adenan, M.M  
NIP. 19661031 199203 1 001

Anggota I

Anggota II

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si  
NIP. 196306141990021001

Dr. Teguh Hadi Priyono, M.Si  
NIP. 19700206 199403 1 002

**MENGESAHKAN**

Dekan

Dr. Muhammad Miqdad, S.E, M.M, Ak,CA  
NIP. 19710727 199512 1 001



**LEMBAR PERSETUJUAN TESIS**

Tesis berjudul : Pemetaan Ketimpangan Wilayah dengan Menggunakan Analisis Klaster dan Strategi Penanggulangannya di Jawa Timur  
Nama Mahasiswa : Roni Setiaji  
NIM : 140820201012  
Jurusan : S-2 Magister Ilmu Ekonomi  
Tanggal Persetujuan : 28 Desember 2016

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

Dr. Zainuri, M.Si  
NIP. 19640325 198902 1 001

Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes  
NIP. 19641108 198902 2 001

Mengetahui/Menyetujui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi  
Program PascaSarjana  
Universitas Jember

Dr. Siti Komariyah, S.E, M.Si  
NIP. 19710610 200112 2 002

## RINGKASAN

**Pemetaan Ketimpangan Wilayah Dengan Menggunakan Analisis Kluster Dan Strategi Penanggulangannya Di Jawa Timur;** Roni Setiaji, 140820201012; 2016; 118 halaman; Magister Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Jember.

Ketimpangan kesejahteraan masyarakat antar wilayah (Kabupaten/Kota) di Jawa Timur merupakan permasalahan yang saat ini masih terjadi terutama kabupaten – kabupaten di Pulau Madura dan daerah tapal kuda. Pemetaan wilayah berdasarkan karakteristik daerah merupakan upaya untuk memberikan informasi dalam penentuan strategi pembangunan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan tepat sasaran, efisien dan efektif. Indikator kesejahteraan digunakan untuk memetakan wilayah merupakan pilihan tepat karena indikator kesejahteraan mencakup semua dimensi, tidak bersifat parsial dan berorientasi pada proses bukan sekedar output yang dihasilkan. Tujuan dari penelitian adalah : (1) mengetahui karakteristik wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat, (2) mengetahui indikator - indikator yang menyebabkan ketimpangan kesejahteraan masyarakat, (3) menentukan strategi perencanaan pembangunan untuk menanggulangi ketimpangan kesejahteraan masyarakat. Metode analisis *cluster* digunakan untuk memetakan wilayah karena analisis ini dapat menggabungkan beberapa set objek ke dalam kelompok – kelompok yang memiliki homogenitas tinggi dalam satu kelompok dan memiliki heterogenitas yang tinggi antar kelompok.

Permasalahan – permasalahan yang menyebabkan ketimpangan kesejahteraan di Jawa Timur adalah masih tingginya angka kemiskinan, masih rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya kesadaran dalam mengakses fasilitas dan tenaga kesehatan, rendahnya kesadaran pola hidup sehat khususnya sanitasi dan air bersih, rendahnya pendapatan masyarakat, rendahnya kemampuan fiscal daerah dalam pembiayaan pembangunan, kurangnya fasilitas komunikasi dan informasi kepada masyarakat dan kurangnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan.

Upaya penanggulangan ketimpangan kesejahteraan dilakukan dengan menyusun strategi berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang

dimiliki daerah melalui program-program pembangunan yang bersentuhan secara langsung dengan permasalahan – permasalahan ketimpangan kesejahteraan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan komitmen yang kuat melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah. Upaya penanggulangannya ketimpangan diantaranya dengan meningkatkan akses dan pelayanan pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kawasan pemukiman, energi dan sumberdaya mineral, pemberdayaan masyarakat masyarakat, dan pengarusutamaan gender.



## SUMMARY

**Mapping On Regional Gap By Utilizing Cluster Analyzes And Its Solution Strategy In East Java;** Roni Setiaji, 140820201012; 2016; 118 page; Master of Economics, Postgraduate Program of Jember University.

The disparity in the welfare between regions (districts / cities) in East Java is a problem that is still occurring, especially the districts of Madura Island and “tapal kuda” (horseshoe) area. Area mapping based on regional characteristics is an effort to provide information in the determination of development strategies so that the implementation of development can run with the right target, efficient and effective. The welfare indicator used to map the region is the right choice because the welfare indicator covers all dimensions, not partial and process-oriented rather than just the output produced. The objectives of the research are: (1) knowing the characteristics of districts / municipalities in East Java based on the indicators of people's welfare, (2) knowing the indicators that cause the inequality of community welfare, (3) to determine the development planning strategy to overcome the imbalance of community welfare. The cluster analysis method is used to map the area because this analysis can combine several sets of objects into groups of high homogeneity in one group and have high heterogeneity between groups.

Issues that cause welfare inequality in East Java are the high rate of poverty, the low level of education, the low awareness in accessing facilities and health personnel, the low awareness of healthy lifestyles, especially sanitation and clean water, low income people, low fiscal ability in the region development financing, lack of communication and information facilities to the community and the lack of women's empowerment in development.

Efforts to tackle welfare gaps are made by strategizing based on local strengths, weaknesses, opportunities and threats through development programs that are in direct contact with welfare gaps and implemented by local governments with strong commitments involving all stakeholders in the regions. Efforts to overcome disparities include increasing access to and services in education, health, infrastructure and residential areas, energy and mineral resources, community empowerment, and gender mainstreaming.

Key word : welfare, mapping, strategy, cluster

## PRAKATA

Puji dan syukur yang tak terhingga senantiasa dihaturkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan bimbingan-Nya, tesis dengan judul Pemetaan Ketimpangan Wilayah dengan Menggunakan Analisis Klaster dan Strategi Penanggulangannya di Jawa Timur dapat diselesaikan.

Tesis ini disusun dalam rangka memotret karakteristik daerah – daerah di Jawa Timur berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat serta mengetahui ketimpangan kesejahteraan masyarakat yang terjadi didalamnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan ketimpangan kesejahteraan masyarakat melalui strategi pembangunan yang tepat sasaran, efisien dan efektif.

Selama penyusunan tesis ini telah banyak pihak yang membantu dan memberikan dorongan baik fisik maupun spiritual agar tesis ini dapat terselesaikan sesuai harapan penulis. Pada kesempatan ini, ijin penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Zainuri, M.Si dan Ibu Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes selaku dosen pembimbing utama dan anggota yang telah memberikan arahan selama proses penyusunan tesis ini.
2. Bapak Dr. Moh. Adenan, M.M, Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si dan Dr. Teguh Hadi Priyono, M.Si selaku dosen ketua dan anggota penguji yang telah memberikan masukan yang positif dan konstruktif untuk penyempurnaan tesis ini.
3. Bapak, ibu, istri dan anak-anak yang selalu memberikan dorongan berupa semangat dan doa selama penyusunan tesis ini.
4. Bapak Kepala Bappeda Kabupaten Bondowoso yang telah memberikan kesempatan belajar di Universitas Jember.
5. Rekan-rekan pada Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Bondowoso yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.

6. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso dan Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan data dan informasi untuk penelitian ini.
7. Kementerian Keuangan RI yang telah menyediakan data dan informasi untuk penelitian ini.
8. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan tesis ini.

Akhir kata penulis berharap tesis ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan upaya mengatasi ketimpangan kesejahteraan di masa mendatang.

Jember, 28 Desember 2016

RONI SETIAJI

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
RINGKASAN/SUMMARY .....	viii
PRAKATA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB 1. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian .....	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....	8
2.1 Landasan Teori .....	8
2.1.1 Teori Kesejahteraan Sosial .....	8
2.1.2 Teori Ekonomi Kesejahteraan .....	10
2.1.3 Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR).....	12
2.1.4 Pengertian Ketimpangan.....	19
2.1.5 Strategi Penanggulangan Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat .....	21
2.2 Kerangka Pemikiran .....	24
2.3 Penelitian Terdahulu.....	27

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN.....	28
3.1 Penentuan Sampel dan Data Penelitian .....	28
3.2 Jenis, Variabel dan Sumber Data.....	28
3.3 Analisis Klaster .....	33
3.3.1 Desain Penelitian dalam Analisis Klaster.....	35
3.3.2 Proses Mendapatkan Jumlah Klaster Optimum...	37
3.4 Strategi Penanggulangan Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat .....	39
3.4.1 Matrik SWOT .....	39
3.4.2 Pendekatan Kualitatif Matrik SWOT .....	40
BAB 4. PEMBAHASAN .....	43
4.1 Klasterisasi Kabupaten/Kota pada Dimensi Keadilan Sosial .....	43
4.1.1 Uji Asumsi Analisis Klaster .....	43
4.1.2 Pembentukan Kelompok.....	43
4.1.3 Interpretasi Klaster.....	46
4.2 Klasterisasi Kabupaten/Kota pada Dimensi Keadilan Ekonomi .....	48
4.2.1 Uji Asumsi Analisis Klaster .....	48
4.2.2 Pembentukan Kelompok.....	49
4.2.3 Interpretasi Klaster.....	51
4.3 Klasterisasi Kabupaten/Kota pada Dimensi Demokrasi dan Tata Kelola.....	53
4.3.1 Uji Asumsi Analisis Klaster .....	53
4.3.2 Pembentukan Kelompok.....	53
4.3.3 Interpretasi Klaster.....	55
4.4 Klasterisasi Kabupaten/Kota menurut Keseluruhan Variabel Kesejahteraan Rakyat .....	57
4.4.1 Uji Asumsi Analisis Klaster .....	57
4.4.2 Pembentukan Kelompok.....	58
4.4.3 Interpretasi Klaster.....	60



4.5	Strategi Penanggulangan Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat .....	64
4.5.1	Faktor Internal .....	64
4.5.2	Faktor Eksternal.....	83
4.5.3	Strategi Strength-Opportunities (S-O).....	86
4.5.4	Strategi Strength-Threats (S-T) .....	88
4.5.5	Strategi Weakness- Opportunity (W-O).....	90
4.5.6	Strategi Weakness- Threats (W-T).....	92
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....		94
5.1	Kesimpulan.....	94
5.2	Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA .....		96
LAMPIRAN.....		100

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
2.1 Indikator Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR) .....	18
4.1 Hasil Uji Multikolinieritas Atas Variabel Bebas pada Dimensi Keadilan Sosial.....	43
4.2 Perubahan Koefisien Aglomerasi pada Dimensi Keadilan Sosial..	44
4.3 Nilai Indeks RMSSTD dan RS pada Dimensi Keadilan Sosial .....	45
4.4 Kelompok Kabupaten/Kota yang Terbentuk pada Dimensi Keadilan Sosial.....	45
4.5 Pusat Klaster Akhir (Final Cluster Centers) pada Dimensi Keadilan Sosial.....	46
4.6. Hasil Uji Multikolinieritas Atas Variabel Bebas pada Dimensi Keadilan Ekonomi.....	48
4.7 Perubahan Koefisien Aglomerasi pada Dimensi Keadilan Ekonomi .....	49
4.8 Nilai Indeks RMSSTD dan RS pada Dimensi Keadilan Ekonomi .....	50
4.9 Kelompok Kabupaten/Kota yang Terbentuk pada Dimensi Keadilan Ekonomi.....	50
4.10 Pusat Klaster Akhir (Final Cluster Centers) pada Dimensi Keadilan Ekonomi.....	51
4.11 Hasil Uji Multikolinieritas Atas Variabel Bebas pada Dimensi Demokrasi dan Tata Kelola.....	53
4.12 Perubahan Koefisien Aglomerasi pada Dimensi Demokrasi dan Tata Kelola .....	53
4.13 Nilai Indeks RMSSTD dan RS pada Dimensi Demokrasi dan Tata Kelola .....	54
4.14. Kelompok Kabupaten/Kota yang Terbentuk pada Dimensi Demokrasi dan Tata Kelola.....	55
4.15 Pusat Klaster Akhir (Final Cluster Centers) pada Dimensi Demokrasi dan Tata Kelola.....	55

4.16	Hasil Uji Multikolinieritas Atas Variabel Bebas Kesejahteraan Rakyat.....	57
4.17	Perubahan Koefisien Aglomerasi pada Variabel Kesejahteraan Rakyat (Gabungan) .....	58
4.18	Nilai Indeks RMSSTD dan RS menurut Variabel Kesejahteraan Rakyat.....	59
4.19	Kelompok Kabupaten/Kota yang Terbentuk menurut Indikator Kesejahteraan Rakyat .....	59
4.20	Pusat Klaster Akhir (Final Cluster Centers) menurut Variabel Kesejahteraan Rakyat .....	60
4.21	Struktur Ekonomi Daerah.....	65
4.22	Jumlah PDRB ADHB dan ADHK Periode 2013-2015.....	66
4.23	Perkembangan PDRB Per Kapita Penduduk Periode 2013-2015 ..	66
4.24	Persentase Jumlah Penduduk (> 10 Tahun) berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan .....	69
4.25	Perbandingan Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 2014-2015 ...	70
4.26	Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Air Minum Layak Tahun 2014-2015 .....	73
4.27	Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Jamban Sendiri Tahun 2014-2015 .....	74
4.28	Rata rata Lama Sekolah (Penduduk Perempuan 15 Tahun ke Atas) Tahun 2014 .....	82
4.29	Matriks Startegi S-O Pengentasan Ketimpangan Kesejahteraan Daerah .....	87
4.30	Matriks Startegi S-T Pengentasan Ketimpangan Kesejahteraan Daerah .....	89
4.31	Matriks Startegi W-O Pengentasan Ketimpangan Kesejahteraan Daerah .....	91
4.32	Matriks Startegi W-T Pengentasan Ketimpangan Kesejahteraan Daerah .....	93

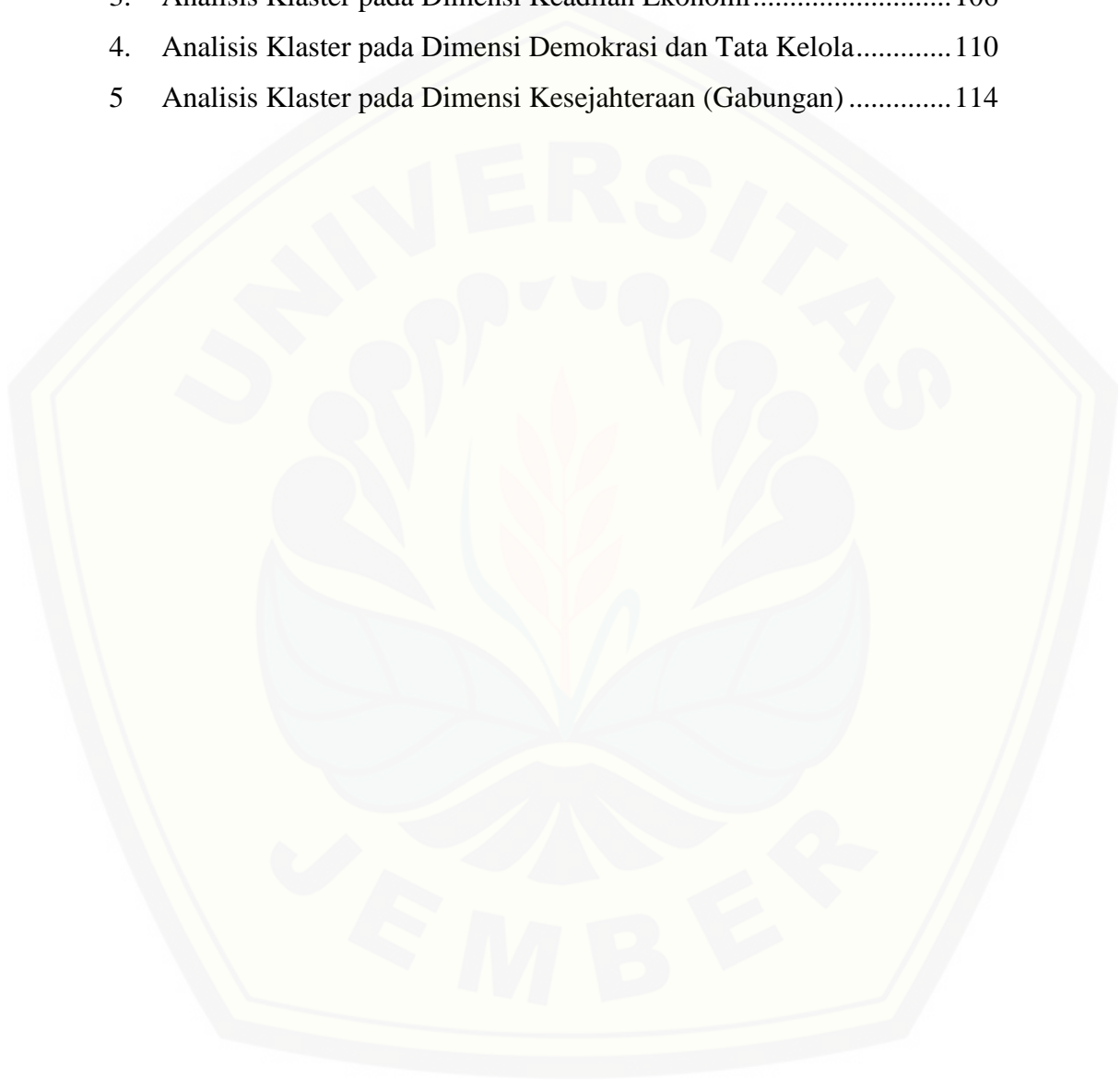
## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	26
3.1 Tabel Pendekatan Kualitatif Matrik SWOT.....	41
4.1 Persentase Perubahan Koefisien Aglomerasi Dimensi Keadilan Sosial .....	44
4.2 Pemetaan Wilayah berdasarkan Dimensi Keadilan Sosial.....	48
4.3 Persentase Perubahan Koefisien Aglomerasi Dimensi Keadilan Ekonomi .....	49
4.4 Pemetaan Wilayah Berdasarkan Dimensi Keadilan Ekonomi .....	52
4.5 Persentase Perubahan Koefisien Aglomerasi Dimensi Tata Kelola .....	54
4.6 Pemetaan Wilayah berdasarkan Dimensi Demokrasi dan Tata Kelola .....	56
4.7 Persentase Perubahan Koefisien pada Keseluruhan Variabel Kesejahteraan Rakyat .....	58
4.8 Pemetaan Wilayah Berdasarkan Keseluruhan Variabel Kesejahteraan Masyarakat.....	63
4.9 Angka Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014-2015 .....	68
4.10 Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014-2015 .....	70
4.11 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2012-2014 .....	71
4.12 Persentase Pertolongan Kelahiran oleh Tenaga Non Medis Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013-2015 .....	72
4.13 Persentase Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014-2015 .....	75
4.14 Persentase Rata-Rata Penduduk Miskin 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan di Jawa Timur Tahun 2015.....	76

4.15	Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Status dan Jenis Pekerjaan di Kabupaten pada Kelompok 1 Tahun 2015 .....	77
4.16	Persentase PAD terhadap APBD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2014 .....	77
4.17	Ratio Pengeluaran Penduduk dengan Garis Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2014.....	79
4.18	Persentase Penerimaan Sinyal Kuat Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur.....	80
4.19	Persentase Jumlah Anggota DPRD Perempuan Menurut Kabupaten/Kota Se- Jawa Timur Tahun 2015 .....	81
4.20	Persentase Keterwakilan Perempuan pada Lembaga DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014 .....	81

**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
1. Statistik Deskriptif Variabel Kesejahteraan .....	100
2. Analisis Klaster pada Dimensi Keadilan Sosial.....	101
3. Analisis Klaster pada Dimensi Keadilan Ekonomi.....	106
4. Analisis Klaster pada Dimensi Demokrasi dan Tata Kelola.....	110
5 Analisis Klaster pada Dimensi Kesejahteraan (Gabungan) .....	114



## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan struktur sosial baik dalam masyarakat maupun institusi menuju pada kondisi yang lebih baik yaitu mengurangi ketimpangan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi (Roger, 1983). Proses perubahan dalam masyarakat juga menyangkut adanya kemajuan sosial dan material yang ditunjukkan dengan bertambahnya kebebasan, keadilan dan kualitas hidup lainnya. Hakekat pembangunan bertujuan untuk mendapatkan kondisi kehidupan yang lebih baik secara materi maupun spiritual.

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia saat ini telah menunjukkan banyak keberhasilan. Pemerataan pembangunan didorong dengan melibatkan dan memperhatikan banyak pihak karena pembangunan yang saat ini dirancang dan disusun telah menganut asas otonomi daerah. Perencanaan pembangunan dilaksanakan agar dapat mengakomodir berbagai kepentingan dengan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Keterbatasan sumber daya dalam membiayai pembangunan mengharuskan perencanaan pembangunan membuat pilihan – pilihan atau urutan prioritas sehingga tidak semua kepentingan dapat diakomodir dalam waktu yang bersamaan. Sumber daya dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah tidaklah sama sehingga pembangunan yang dilaksanakan saat ini masih menyisakan berbagai permasalahan diantaranya ketimpangan kesejahteraan antar daerah, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa pembentukan pemerintahan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Janji kemerdekaan yang diamanatkan dalam pembentukan pemerintah Negara Indonesia tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini dipertegas dengan pasal-pasal yang

tercantum dalam batang tubuh UUD Tahun 1945 diantaranya: (1). Pasal 28C ayat 1: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya, dan demi kesejahteraan umat, (2). Pasal 28H ayat 1: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, (3). Pasal 28H ayat 3: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”, (4). Pasal 34 ayat 1: Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara, dan (5). Pasal 34 ayat 2: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Berdasarkan janji kemerdekaan dalam pembukaan dan amanat dalam pasal UUD Tahun 1945 maka dapat ditarik benang merah bahwa tujuan dari terbentuknya NKRI adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dari berbagai dimensi atau sudut pandang yang menyangkut dengan kebutuhan dasar manusia.

Dimensi kesejahteraan rakyat memiliki pengertian yang beragam. Salah satunya adalah konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1993) yang dapat disejajarkan dengan konsep martabat manusia yang ditinjau dari 4 (empat) indikator yaitu: (1). rasa aman (*security*), (2). kesejahteraan (*Welfare*), (3). kebebasan (*Freedom*), dan (4). jati diri (*Identity*). Kesejahteraan tidak hanya menyangkut pada kondisi ekonomi dan sosial yang mapan akan tetapi dimensi lain yang ingin dicapai seperti hak-hak sipil, politik, dan berorganisasi yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik mulai dari pemerintah desa hingga pemerintah pusat. Oleh karena itu dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemerintah harus mampu menciptakan kondisi yang stabil sehingga aspek sosial dan ekonomi serta aspek demokrasi dan tata kelola pemerintahan dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat juga menjadi tanggungjawab pemerintahan daerah melalui fungsi penyelenggaraan



pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran pemerintahan daerah dalam era otonomi dan desentralisasi diharapkan dapat mempercepat proses pemerataan pembangunan untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.

Salah satu pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah dengan menggunakan Indeks Kesejahteraan Masyarakat. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia telah meluncurkan Indeks Kesejahteraan Rakyat atau disingkat IKRaR. Indeks ini dihitung dengan menggunakan 3 (tiga) dimensi, yaitu Dimensi Keadilan Sosial, Dimensi Keadilan Ekonomi, dan Dimensi Demokrasi dan Tata Kelola yang didalamnya terdapat 22 indikator (variabel). IKRaR telah mengakomodir beberapa ukuran tingkat kesejahteraan seperti gini rasio, tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya.

Todaro (2003), mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat kelas menengah kebawah dapat ditinjau dari kualitas taraf hidupnya berdasarkan beberapa indikator yang dimilikinya seperti menurunnya tingkat kemiskinan, perbaikan tingkat kesehatan, tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan meningkatnya produktivitas. Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatan-tingkatan pencapaian indikatornya.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana kesejahteraan itu dapat dinikmati oleh masyarakat secara merata. Disparitas pembangunan antar wilayah dalam konteks otonomi daerah masih terjadi secara masif. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan potensi yang dimiliki oleh daerah dalam membangun daerahnya. Potensi daerah menurut kamus Glosarium adalah “potensi fisik dan nonfisik dari suatu daerah/wilayah seperti penduduk, sumber daya alam,

sumber daya buatan dan sumber daya sosial”. Adanya disparitas antar wilayah memunculkan ketimpangan – ketimpangan ekonomi dan sosial. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019 telah menegaskan bahwa di Indonesia saat ini masih terdapat 122 daerah tertinggal.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 disebutkan, bahwa daerah tertinggal adalah kabupaten yang wilayah dan masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria (indikator) sebagai berikut: (a) perekonomian masyarakat; (b) sumber daya manusia; (c) sarana dan prasarana; (d) kemampuan keuangan daerah; (e) aksesibilitas; dan (f) karakteristik daerah. Menurut Lay (1993), ketidakmerataan atau kesenjangan antar wilayah ditandai dengan beberapa indikator yaitu tingkat kesejahteraan penduduk, mutu pendidikan, bentuk investasi, dan sarana prasarana publik yang memadai,

Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 masih memiliki 4 (empat) kabupaten tertinggal yaitu: 1. Kabupaten Bondowoso; 2. Kabupaten Situbondo; 3. Kabupaten Bangkalan; dan 4. Kabupaten Sampang. Sebuah kabupaten dikategorikan tertinggal karena tidak memenuhi minimal salah satu kriteria dari 6 (enam) kriteria penentuan daerah tertinggal. Enam kriteria daerah tertinggal diatas dapat pula didekati dengan penggunaan indikator-indikator kesejahteraan masyarakat sebagai alternatif untuk membantu pengklasifikasian daerah-daerah berdasarkan capaian kinerja kesejahteraan.

Provinsi Jawa Timur terdiri dari 38 kabupaten/kota yang memiliki karakteristik berbeda atau beragam. Karakteristik dalam penelitian ini terdiri dari beberapa indikator kesejahteraan masyarakat yang diukur pada masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur. Pemetaan terhadap kabupaten/kota berdasarkan kedekatan karakteristik yang dimilikinya akan lebih memiliki makna karena dapat memberikan data atau informasi tentang kelompok kabupaten/kota yang terbentuk dan permasalahannya.

Pengelompokkan kabupaten/kota di Jawa Timur berdasarkan dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi demokrasi dan penggabungan keseluruhan

indikator sebagai dimensi kesejahteraan masyarakat dapat memberikan evaluasi terhadap kelemahan dan kelebihan ukuran kesejahteraan secara umum pada masing-masing klaster/kelompok kabupaten/kota yang terbentuk sehingga kedepan akan sangat berguna sebagai rekomendasi bagi pemangku kepentingan dan pemangku keputusan khususnya pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan upaya untuk memperbaiki ukuran kesejahteraan masyarakat.

## 1.2 Rumusan Masalah

Pemetakan wilayah kabupaten/kota berdasarkan variabel/indikator penyusun Indeks Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Timur sangat penting untuk dilakukan. Pemetakan wilayah dapat memberikan informasi tentang sifat atau karakteristik pada masing-masing kelompok kabupaten/kota yang terbentuk. Karakter yang terbentuk antar kelompok akan sangat beragam. Karakter-karakter yang terbentuk dari masing-masing kelompok akan sangat berguna untuk membantu para stakeholder dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan yang akan dilakukan.

Berkenaan dengan hal diatas, maka perumusan masalah yang dapat ditentukan sebagai berikut:

- a. Bagaimana wilayah – wilayah di Jawa Timur dapat dikelompokkan atau dipetakan menurut karakteristik daerahnya berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat dalam dimensi keadilan sosial, dimensi keadilan ekonomi, dimensi demokrasi dan tata kelola pemerintahan, dan dimensi kesejahteraan rakyat secara menyeluruh?
- b. Apa saja indikator-indikator yang menyebabkan ketimpangan kesejahteraan masyarakat dalam masing-masing kelompok wilayah yang terbentuk?
- c. Bagaimana strategi perencanaan pembangunan dalam penanggulangan ketimpangan kesejahteraan yang dapat dilakukan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik wilayah yang terbentuk berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat dan strategi perencanaan pembangunan untuk penanggulangan ketimpangan kesejahteraan. Secara detail tujuan dari penilaian ini adalah:

- a. Memetakan dan mengetahui kelompok wilayah yang terbentuk di Jawa Timur berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat dalam dimensi keadilan sosial, dimensi keadilan ekonomi, dimensi demokrasi dan tata kelola pemerintahan, dan dimensi kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
- b. Mengidentifikasi indikator-indikator yang menyebabkan ketimpangan kesejahteraan masyarakat dalam masing-masing kelompok wilayah yang terbentuk.
- c. Menyusun strategi perencanaan pembangunan dalam penanggulangan ketimpangan kesejahteraan yang dapat dilakukan khususnya di wilayah – wilayah yang mengalami ketimpangan di Jawa Timur.

### 1.4 Manfaat Penelitian

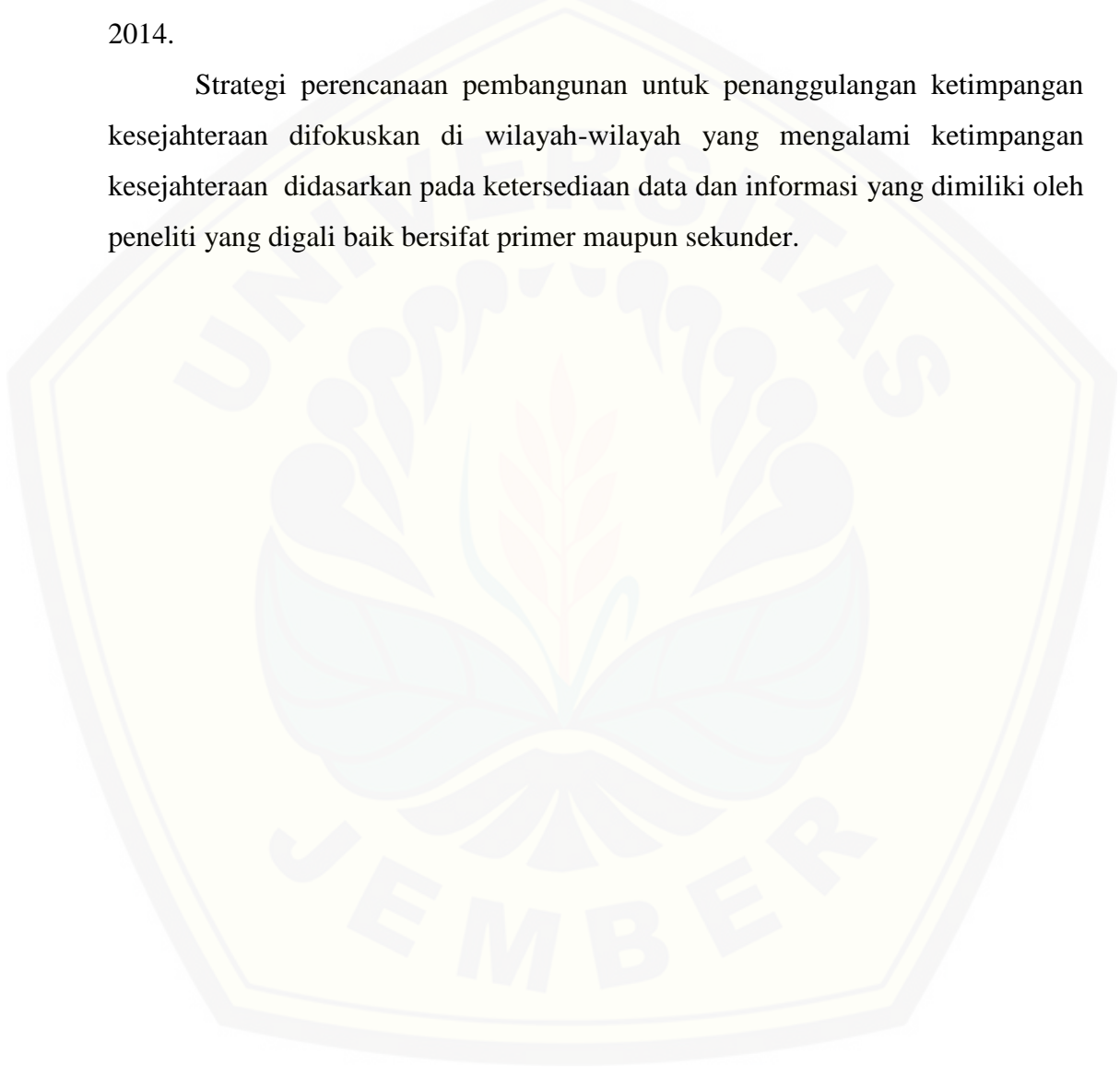
Penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum tentang karakteristik wilayah di Jawa Timur dan kelompok wilayah yang terbentuk berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat yang dapat dimanfaatkan oleh semua pihak baik dari kalangan masyarakat, para peneliti, akademisi dan pemerintah. Secara khusus manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Hasil pemetaan wilayah berdasarkan variabel/indikator kesejahteraan masyarakat pada dimensi keadilan sosial, dimensi keadilan ekonomi, dimensi demokrasi dan tata kelola pemerintahan, dan dimensi kesejahteraan rakyat secara menyeluruh dapat dijadikan sebagai informasi kepada masyarakat agar dapat memahami kelebihan dan kelemahan daerahnya.
- b. Kelebihan dan kelemahan pada masing-masing daerah dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan daerah khususnya strategi penanggulangan ketimpangan kesejahteraan.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian dibatasi oleh ketersediaan data yang diperoleh oleh peneliti pada 14 jenis variabel data dari sekian banyak variabel kesejahteraan yang ada. Data bersifat sekunder yang diperoleh dari sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur tahun 2014 dan Kementerian Keuangan RI tahun 2014.

Strategi perencanaan pembangunan untuk penanggulangan ketimpangan kesejahteraan difokuskan di wilayah-wilayah yang mengalami ketimpangan kesejahteraan didasarkan pada ketersediaan data dan informasi yang dimiliki oleh peneliti yang dicari baik bersifat primer maupun sekunder.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Teori Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai upaya atau tindakan dari manusia untuk mendapatkan taraf/kualitas kehidupan yang lebih mapan baik sebagai individu maupun masyarakat. Kesejahteraan sosial dalam arti luas menunjukkan suatu kondisi dimana manusia memiliki nilai kesejahteraan yaitu manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup/dasar (*basic need*) yang meliputi pemenuhan kebutuhan atas pakaian, makanan, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan (Suharto, 2005). Menurut Spiker (1995), menyatakan bahwa upaya kesejahteraan sosial mencakup lima bidang yang meliputi (1) bidang kesehatan; (2) bidang pendidikan; (3) bidang perumahan; (4) bidang jaminan sosial; (5) bidang pekerjaan sosial. (Adi, 2002).

Selain itu kesejahteraan sosial bukan sekedar tindakan atau perilaku individu tetapi juga merupakan tindakan organisasi atas penyelenggaraan pelayanan sosial kepada individu maupun kelompok masyarakat. Kesejahteraan sosial merupakan upaya terencana yang dilaksanakan oleh perseorangan, masyarakat, lembaga-lembaga sosial maupun institusi pemerintah dalam rangka memperbaiki kualitas taraf hidup melalui serangkaian kegiatan seperti pelayanan sosial dan tunjangan sosial. Menurut Suharto, 2005 definisi kesejahteraan merujuk atas segenap aktivitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat khususnya bagi kelompok yang kurang beruntung (*disadvantage groups*). Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 1 dan ayat 2, dijelaskan bahwa:

- a. “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

- b. “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial”.

Beberapa pengertian kesejahteraan sosial menurut para ahli:

- a. Menurut Walter A. Friedlander, 1961 dalam Pengantar Kesejahteraan Sosial oleh Drs. Syarif Muhidin, Msc. Kesejahteraan sosial adalah sebuah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada individu maupun kelompok untuk meningkatkan taraf hidup dan kesehatan yang memuaskan serta memberikan kesempatan untuk mewujudkan relasi atau hubungan individu maupun sosial sehingga mampu mengembangkan diri untuk mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan.
- b. Menurut Dwi Heru Sukoco, 1995 dari buku *Introduction to Sosial Work Practice* oleh Max Siporin. “Kesejahteraan sosial adalah keseluruhan upaya atau tindakan dan proses yang secara langsung berhubungan dengan tindakan untuk mencegah timbulnya masalah sosial, upaya untuk pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas kehidupan”. Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai bentuk intervensi secara langsung kepada individu maupun kelompok untuk menjadikan keadaan semakin baik.
- c. Menurut Zastrow, 2000, kesejahteraan sosial adalah sebuah sistem yang terdiri dari program dan pelayanan (*service*) guna memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan dari semua individu dalam masyarakat. Kesejahteraan sosial berupaya untuk meningkatkan fungsi sosial dari semua kelompok umur, baik kaya dan miskin. Ketika lembaga lain di masyarakat, seperti ekonomi pasar dan keluarga, gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar individu atau kelompok maka pelayanan sosial sangat diperlukan dan dituntut untuk dapat memenuhi.
- d. Menurut Arthur Dunham, kesejahteraan sosial merupakan kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dan terencana untuk meningkatkan kesejahteraan dari segi

sosial dengan memberi serangkaian bantuan kepada orang dalam memenuhi kebutuhan–kebutuhan dasar. Kesejahteraan sosial juga merupakan sebuah proses yang membawa dan memberi penyesuaian antara kebutuhan sosial dan ketersediaan sumber daya sosial yang ada dalam suatu wilayah atau area.

- e. Menurut Borneo, kesejahteraan sosial adalah layanan khusus yang disediakan dan pemberian bantuan materi kepada semua atau sebagian dari masyarakat yang dianggap membutuhkan. Batas terhadap kesejahteraan sosial sampai saat ini masih belum tergambar secara pasti karena kesejahteraan sosial bersifat mengalir. Dalam membantu memahami konsep kesejahteraan maka terdapat beberapa kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat yang perlu upaya pengaturan dan pengorganisasian diantaranya: (1) Pendidikan, sekolah negeri dan swasta, pendidikan orang dewasa, dan perpustakaan umum. (2) petugas penjara, polisi, pembebasan bersyarat dan masa percobaan, ahli hukum, dan pengadilan. (3) rawat inap dan prosedur klinis, jasa dokter dan perawat. (4) dana kesehatan dan/atau dana pensiun. (5) pensiun PNS dan, rencana pensiun, pemerintah berkontribusi dalam kapasitas sebagai pembuat kebijakan dan regulasi dan lainnya (Dickinson, 1970).
- f. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, kesejahteraan sosial adalah kegiatan yang terorganisir dengan tujuan untuk member bantuan kepada individu-individu dalam hubungan timbal balik dengan lingkungan sosialnya. Tujuan ini dicapai secara seksama melalui tehnik dan metode-metode dengan maksud agar memungkinkan individu-individu, kelompok-kelompok maupun komunitas-komunitas memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan memecahkan masalah-masalah penyesuaian diri mereka terhadap perubahan pola-pola masyarakat, serta melalui tindakan kerjasama untuk memperbaiki kondisi-kondisi ekonomi dan sosial.

### 2.1.2 Teori Ekonomi Kesejahteraan

Pembangunan ekonomi dalam konsep lama adalah kemampuan suatu negara untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam selang 5 – 7 persen setiap tahunnya (Arsyad, 2002). Peningkatan PDB akan menyebabkan pendapatan per kapita suatu masyarakat



meningkat dalam jangka panjang. Pengertian ini masih sangat bersifat ekonomi belum memperhatikan aspek-aspek sosial yang timbul dari pembangunan ekonomi. Sedangkan menurut Tadaro (dalam Munir, 2002) menyatakan bahwa pembangunan merupakan proses menuju perbaikan taraf kehidupan masyarakat secara menyeluruh dan bersifat dinamis. Keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan dengan (1). kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, (2). timbulnya rasa percaya diri yang dapat meningkatkan harga diri dan derajat sebagai manusia, dan (3) adanya kemampuan untuk dapat memilih atas pilihan – pilihan yang tersedia. Pembangunan juga merupakan usaha sadar untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada guna mendapatkan peningkatan mutu kehidupan (Kuncoro, M, 2003).

Sebagian besar ekonom menggunakan istilah ekonomi kesejahteraan sebagai kerangka kerja untuk melakukan evaluasi terhadap penghasilan yang diinginkan oleh masyarakat. Ekonomi kesejahteraan menganggap individu sebagai unit dasar pengukuran oleh karena itu ekonomi kesejahteraan berupaya untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial dengan melihat kegiatan ekonomi dari individu-individu yang ada didalam masyarakat.

Menurut O’Connel (1982) ekonomi kesejahteraan (*welfare economics*) merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang terkait dengan itu. Ekonomi kesejahteraan menyediakan dasar untuk menilai prestasi pasar dan pembuat kebijakan dalam alokasi sumberdaya (Besley, 2002).

Ada dua hal yang menjadi perhatian dari ekonomi kesejahteraan, yaitu efisiensi ekonomi dan distribusi pendapatan. Efisiensi ekonomi dalam ekonomi kesejahteraan merupakan tindakan dari pelaku ekonomi pasar untuk melakukan pengalokasian sumberdaya/faktor produksi yang dimiliki secara optimal. Sumber daya dalam perekonomian dialokasikan secara optimal oleh harga yang terbentuk dalam pasar persaingan sempurna (Sunaryo, 2000).

Perhatian kedua dalam ekonomi kesejahteraan adalah distribusi pendapatan. Pertumbuhan versus distribusi pendapatan merupakan masalah yang

menjadi perhatian di penjuru dunia khususnya negara yang sedang berkembang. Beberapa negara mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun belum mampu memecahkan masalah kemiskinan. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum dirasakan oleh banyak orang belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan ketika tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut diiringi dengan meningkatnya tingkat pengangguran dan pengangguran semu di daerah pedesaan maupun perkotaan. Distribusi pendapatan antara kelompok kaya dengan kelompok miskin semakin senjang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata telah gagal untuk mengurangi luasnya kemiskinan (Arsyad, 2004). Namun perlu pula disadari bahwa mekanisme pasar yang terjadi dalam kegiatan ekonomi saat ini telah menjadikan optimalisasi pengalokasian sumberdaya menjadi sulit. Ada sejumlah kondisi yang kebanyakan ahli ekonomi setuju untuk diperbolehkan tidak efisien meliputi: struktur pasar yang tidak sempurna (seperti monopoli, monopsoni, oligopoli, oligopsoni, dan persaingan monopolistik), alokasi faktor tidak, kegagalan pasar dan eksternalitas, diskriminasi harga, penurunan biaya rata-rata jangka panjang, beberapa jenis pajak dan tarif. Kompetisi dalam pasar dapat menimbulkan dampak negatif untuk terwujudnya kesejahteraan ekonomi. Hal ini yang menjadikan kesejahteraan sosial menjadi alat penyeimbang dalam mengatur kegagalan pasar dan ketimpangan ekonomi antar individu dalam masyarakat.

### **2.1.3 Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR)**

IKraR adalah singkatan dari Indeks Kesejahteraan Rakyat yang digunakan sebagai:

- a. Indeks untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat di Indonesia;
- b. alat ukur keberhasilan pembangunan yang inklusif; dan
- c. alat ukur ketersediaan akses terhadap pemenuhan hak-hak dasar rakyat.

Perumusan IkraR dimulai dari batasan tentang cakupan kesejahteraan. Kesejahteraan saat ini masih bersifat holistik, kesejahteraan hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi dan sosial. IkraR memandang kesejahteraan dengan sudut pandang yang lebih luas yang mencakup kepada pengukuran tiga dimensi

sekaligus yaitu dimensi kesejahteraan ekonomi, dimensi kesejahteraan sosial dan dimensi kesejahteraan politik yang dijabarkan dengan demokrasi dan governance.

Terdapat beberapa alasan, yang mendasari IkraR diperlukan dan diukur, yaitu:

a. Argumentasi Faktual

- 1) Tujuan pembangunan nasional pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, adil, makmur dan sejahtera. Namun belum ada indikator yang secara khusus dapat mengukur tingkat kesejahteraan rakyat sesuai yang diharapkan. Ukuran-ukuran kesejahteraan yang digunakan saat ini lebih bersifat makro, sektoral dan tidak komprehensif.
- 2) Pengukuran kesejahteraan selama ini lebih dipandang dari perspektif ekonomi, dengan mengukur indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, investasi dan jumlah uang beredar. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum mampu sepenuhnya menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat karena masih adanya ketimpangan pendapatan masyarakat dan kemiskinan. Kenaikan PDB (Produk Domestik Bruto) apabila diciptakan oleh sekelompok masyarakat tidak akan berarti bagi kelompok masyarakat yang lainnya. Selain itu, ukuran yang bersifat makro ini sesungguhnya tidak sesuai dengan kondisi dan realitas ke-Indonesia-an dimana masyarakat mempunyai latar belakang kultur, geografis, dan etnis yang berbeda-beda.
- 3) Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan saat ini belum memperhatikan aspek kesenjangan baik kesenjangan antar individu, antar sektor dan antar wilayah. Pembangunan di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa masih belum merata dan belum bisa disejajarkan, yang mengarah pada kesenjangan. Begitu pula kondisi geografis di Indonesia yang cenderung berbeda membutuhkan penanganan yang berbeda pula. Indikator kesenjangan perlu diperhitungkan dengan cermat sehingga kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat lebih efektif.
- 4) Alat ukur kesejahteraan yang ada belum memperhatikan ketersediaan input dan akses melainkan lebih terfokus kepada output. Sebagaimana IPM (Indek Pembangunan Manusia) yang mengukur angka harapan hidup, angka harapan

lama sekolah, angka rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita merupakan ukuran-ukuran output kebijakan yang menunjukkan hasil akan tetapi ukuran terhadap akses untuk mencapai output belum menjadi perhatian. IKraR dimaksudkan untuk memastikan apakah akses untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu masyarakat sejahtera telah tersedia secara memadai dan apakah akses tersebut telah dimanfaatkan oleh warga.

- 5) Adanya pergeseran paradigma terhadap keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan selama ini ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi yang menurun, turunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Sedangkan paradigma yang baru adalah keberhasilan pembangunan dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam sebagaimana hasil KTT Bumi pada tahun 1992. Dalam konteks ini IKraR disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek keberlanjutan baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan yang ditunjukkan dengan beberapa indikator didalamnya.

b. Argumentasi Konstitutif

Dalam beberapa pasal di Undang-Undang Dasar 1945 terdapat hak – hak warga negara yang harus dipenuhi dan menjadi kewajiban Negara sebagai berikut:

- 1) Pasal 28C ayat 1: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya, dan demi kesejahteraan umat.
- 2) Pasal 28H ayat 1: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- 3) Pasal 28H ayat 3: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.
- 4) Pasal 34 ayat 1: Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

- 5) Pasal 34 ayat 2: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidakmampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Dari kelima pasal diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan rakyat tidak bisa hanya dipandang dari sisi ekonomi dan sosial, tetapi juga terpenuhinyahak-hak sipil, politik, dan berorganisasi yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks ini kesejahteraan tidak dapat dipahami hanya dari salah satu sisi saja karena ke semua aspek tersebut dimana di dalam indeks kesejahteraan rakyat diwadahi dalam tiga dimensi- sama pentingnya dan harus secara paralel dipenuhi. Oleh karena itu dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, aspek keadilan sosial, keadilan ekonomi, demokrasi dan tata kelola yang baik (governance) harus diciptakan dan dipastikan terus berlanjut.

c. Argumentasi Hubungan Internasional

Indonesia salah satu negara yang ikut serta meratifikasi Kovenan tentang pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Kultural (EKOSOB, UN) pada tahun 2005. Terdapat tiga hak dasar yang harus dipenuhi Negara yang ikut dalam EKOSOB yaitu:

- 1) *The right of all people to self-determination*: hak untuk menentukan status politik, mencapai tujuan ekonomi, sosial dan kultural, serta mengelola sumberdayayang dimilikinya
- 2) *The principle of progressive realisation*: mencakup hak agar dapat diterimatampa diskriminasi.
- 3) Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Kultural: Hak atas pekerjaan yang layak; Hak atas jaminan sosial; Hak atas kehidupan berkeluarga; Hak atas standar hidup yang layak; Hak atas kesehatan; Hak atas pendidikan; dan Hak atas partisipasi dalamkehidupan berbudaya.

Konsekuensi dari keikiutsertaan negara dalam ratifikasi tersebut adalah adanya suatu keharusanuntuk melaksanakannya maka dengan adanya IkraRdapat diketahui nilai masing-masing dimensi dan indikator mana yang paling rendahuntuk kemudian menjadi prioritas kebijakan untuk ditangani.

IKraR terdiri atas 3 dimensi, yakni: keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan dimensi demokrasi dan governance. Berikut ini batasan masing-masing dimensi:

a. Dimensi Keadilan Sosial

Keadilan dapat didefinisikan bahwa setiap orang mendapatkan hak yang sama sesuai dengan kontribusi yang diberikan. Dalam pembukaan UUD 1945, alenia keempat tertulis “Susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan, serta dengan Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Pada akhir alenia tercantum kalimat aktif yaitu “Mewujudkan Keadilan Sosial” yang menunjukkan bahwa pemerintah harus mampu memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah meletakkan prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat. Program penegakkan keadilan sosial yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu, pertama memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang dan kedua mampu mengatur kembali kesenjangan sosial-ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberikan keuntungan yang bersifat timbal balik bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok yang beruntung maupun yang tidak beruntung. Keadilan sosial bukan hanya menyangkut persoalan proses distribusi atau pemerataan, akan tetapi juga menyangkut upaya pemenuhan kebutuhan dasar, serta tindakan afirmatif oleh penyelenggara negara untuk melindungi dan memastikan setiap warga negara mendapatkan pemenuhan terhadap hak dasarnya.

b. Dimensi Keadilan Ekonomi

Keadilan ekonomi bukan sekedar keberhasilan dari pencapaian indikator makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lain sebagainya akan tetapi lebih ditekankan kepada keadilan kepada masyarakat dalam memperoleh dan mengakses sumberdaya ekonomi. Pemerintah harus dapat memastikan bahwa setiap warga Negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak-

haknya dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi. Jadi dimensi keadilan ekonomi dalam IKraR ini mengukur lebih kepada kemajuan indikator yang mencerminkan kepemilikan dan akses rakyat terhadap sumberdaya ekonomi untuk mencapai kesejahteraannya.

c. Dimensi Demokrasi dan Tata Kelola

Dimensi demokrasi adalah dimensi keadilan yang memberikan dan menjamin hak kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan demokrasi secara mandiri tanpa diskriminasi. Tujuan dari Dimensi ini secara umum adalah untuk mendorong tercapainya hak-hak rakyat atas rasa keadilan hukum dan dihormatinya hak-hak politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan bangsa.

Pasca bergantinya rezim orde baru menjadi rezim reformasi, Pembangunan demokrasi Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir menunjukkan kemajuan mendasarkhususnya dari sisi kebebasan rakyat dalam menyuarakan pendapatnya, sementara supremasi hukum belum menunjukkan kemajuan berarti. Sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi” Itu artinya, kemajuan demokrasi dilihat dari penegakan hukum (supremasi hukum) secara konsisten, adil, utuh, dan tanpa diskriminatif.

Konstitusi Negara juga mengakui dan menjamin hak setiap warga Negara sebagai pemegang kedaulatan Negara secara utuh. Itu artinya bahwa dalam penegakan hukum, pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan demokrasi harus memenuhi rasa keadilan warga Negara (rakyat) tanpa diskriminasi. Inilah yang disebut sebagai Negara demokrasi berasaskan hukum atau *demokratische rechtsstaat*.

Tabel 2.1 Indikator Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR)

No	Indikator	Keterangan	Penamaan dan Normalisasi Peta	Dimensi
1	2	4	5	6
1	V1	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama	Akses Listrik	Keadilan Sosial
2	V2	Persentase penduduk yang dapat menikmati akses berobat selama 6 bulan terakhir	Akses Berobat	
3	V3	Persentase rumah tangga yang melakukan rekreasi (berlibur, olahraga/kesenian)	Rekreasi	
4	V4	Rata-rata lama sekolah penduduk Tahun (tahun)	Lama Sekolah > Usia 15 Tahun	
5	V5	Persentase rumah tangga yang menerima jaminan sosial (Jamkesmas, Kartu sehat, Surat Miskin (SKTM), lainnya)	Pemanfaatan Jaminan Sosial	Keadilan Sosial
6	V6	Persentase penduduk yang usianya mencapai 40 tahun	Harapan hidup > 40 Tahun	
7	V7	Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih sebagai sumber air minum	Akses Air Bersih	
8	V8	Persentase rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri/bersama	Akses pada Sanitasi	
9	V9	Persentase penduduk tidak miskin	Pengeluaran perkapita > GK	
10	V10	Pemerataan Pendapatan	Tingkat Pemerataan Pendapatan	
11	V11	Persentase rumah tangga yang memiliki rumah sendiri	Kepemilikan Rumah Sendiri	Keadilan Ekonomi
12	V12	Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja	Bekerja Usia > 15 Tahun	
13	V13	Rasio rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dengan garis kemiskinan (GK)	Rasio Pengeluaran terhadap GK	
14	V14	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD	Rasio PAD terhadap APBD	
15	V15	Persentase rumah tangga yang menerima kredit dari bank	Akses kepada Sumberdaya Ekonomi	



No	Indikator	Keterangan	Penamaan dan Normalisasi Peta	Dimensi
1	2	4	5	6
16	V16	Proporsi pengeluaran rumah tangga untuk biaya pendidikan terhadap total pengeluaran terhadap total pengeluaran	Rasio Biaya Pendidikan	Demokrasi
17	V17	Proporsi pengeluaran rumah tangga untuk biaya kesehatan terhadap total pengeluaran	Rasio Biaya Kesehatan terhadap total pengeluaran	
18	V18	Persentase rumah tangga yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	Akses Informasi	
19	V19	Persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam setahun terakhir (adjusted)	Rasa Aman	
20	V20	Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia	Kebebasan Sipil	
21	V21	Aspek Hak-Hak Politik dalam Indeks Demokrasi Indonesia	Hak Politik	
22	V22	Aspek Lembaga Demokrasi dalam Indeks Demokrasi Indonesia	Lembaga Demokrasi	

#### 2.1.4 Pengertian Ketimpangan

Ketimpangan pembangunan antar daerah merupakan hal yang lazim terjadi baik dalam dimensi sosial maupun ekonomi. Ketimpangan terjadi karena adanya perbedaan potensi yang dimiliki oleh daerah baik karakteristik daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Perbedaan ini menyebabkan kemampuan daerah untuk melaksanakan proses pembangunan menjadi berbeda (Williamson, 1965, dalam Hartono, 2008).

Menurut Kuncoro (2004), perbedaan laju pertumbuhan antara daerah dikarenakan oleh berbagai faktor antara lain: peranan modal (investor) yang lebih memilih daerah kota atau daerah yang memiliki fasilitas yang lengkap seperti: prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan jalan, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, ketersediaan tenaga kerja yang terampil. Perbedaan laju pertumbuhan juga disebabkan adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari pemerintah pusat kepada daerah.

Kebijakan pemerintah tidak akan membatasi arus modal ke tempat-tempat tertentu namun arus modal memiliki logika sendiri dalam menempatkan dirinya ke tempat-tempat strategis yaitu di lokasi-lokasi yang mempunyai prospek return atau tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, dan tingkat risiko yang lebih rendah. Sehingga tidak dapat dihindari jika arus modal lebih terkonsentrasi di daerah-daerah kaya sumber daya alam dan kota-kota besar yang prasarana dan sarannya lebih lengkap yang mengakibatkan jumlah penduduk yang menganggur di Provinsi yang berkembang akan meningkat (Hartono, 2008).

Ketimpangan seringkali diidentikkan dengan ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi digunakan sebagai indikator perbedaan pendapatan per kapita rata-rata, antar kelompok tingkat pendapatan, antar kelompok lapangan kerja, dan antar wilayah. Ketimpangan didekati dengan mengukur pendapatan per kapita atau PDRB per kapita yaitu Produk Domestik Regional Bruto dibagi dengan jumlah penduduk. Cara lain yang bisa digunakan adalah dengan mendasarkan kepada pendapatan personal yang didekati dengan pendekatan konsumsi (Widiarto, 2001). Dalam pengukuran ketimpangan pembangunan ekonomi regional digunakan Indeks Williamson.

Berikut beberapa definisi ketimpangan menurut teori para ahli :

a. Menurut Andrinof A. Chaniago

Ketimpangan adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial.

b. Menurut Budi Winarno

Ketimpangan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga masyarakat.

c. Menurut Jonathan Haughton & Shahidur R. Khandker

Ketimpangan sosial adalah bentuk-bentuk ketidak-adilan yang terjadi dalam proses pembangunan.

d. Roichatul Aswidah

Ketimpangan sosial sering dipandang sebagai dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi.

### **2.1.5 Strategi Penanggulangan Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat**

Pembangunan yang dilakukan oleh negara menunjukkan banyak keberhasilan yang ditandai dengan tercapainya target-target kinerja makro ekonomi maupun sosial. Namun pembangunan yang dilaksanakan belum menunjukkan hasil yang merata. Pembangunan jika dilihat secara spasial belum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil. Ketimpangan pembangunan baik dari sisi ekonomi maupun sosial secara masif masih terjadi antar wilayah. Sebagai contoh ketimpangan pembangunan terjadi antara pulau Jawa dan luar pulau Jawa, antara perkotaan dan perdesaan, antara kawasan Indonesia barat dan timur.

Menurut Bappenas (2005), ketimpangan pembangunan antar wilayah disebabkan oleh adanya perbedaan sumber daya atau potensi yang dimiliki masing-masing daerah di Indonesia serta kebijakan pemerintah yang cenderung sentralistis baik dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan. Berbagai upaya pemerintah dalam mengurangi ketimpangan pembangunan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung pemerintah telah membuat kerangka anggaran kepada daerah melalui transfer daerah, tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Sedangkan secara tidak langsung pemerintah telah membuat kerangka regulasi untuk memberikan fasilitasi dan pengaturan untuk pembangunan daerah namun hasilnya belum memadai untuk mengurangi tingkat kesenjangan yang ada.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di Indonesia. Perkembangan pembangunan di Jawa Timur relatif cepat dengan pertumbuhan ekonomi diatas rata – rata nasional. Namun disisi lainnya perkembangan pembangunan Jawa Timur belum dapat merata di seluruh kabupaten/kota. Menurut Istifadah (2006), perbedaan sumber daya dan hasil pembangunan di Jawa Timur terjadi di antara kabupaten/kota yang menimbulkan dampak perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah. Untuk mengurangi ketimpangan antar kabupaten/kota di Jawa Timur, diperlukan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan ketimpangan spasial yang dilakukan dengan pendekatan regional dan sektoral.

Menurut Mc Nicholas (1977), strategi adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Strategi secara luas dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi itu melakukannya (Bryson, 2001).

Hax dan Majluf (1991) menawarkan rumusan yang komprehensif tentang strategi sebagai berikut: (lihat salusu,1996)

- a. Strategi adalah suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu dan integral;
- b. Menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi sumber daya;
- c. Menyeleksi bidang yang akan digeluti atau akan digeluti organisasi;
- d. Mencoba mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama, dengan memberikan respon yang tepat terhadap peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi, dan kekuatan serta kelemahannya;
- e. Melibatkan semua tingkat hierarki dari organisasi.

Menurut Suwarsono (1994) manajemen strategis dapat diartikan sebagai usaha manajerial menumbuhkembangkan kekuatan perusahaan untuk mengeksploitasi peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang telah ditentukan. Komponen pokok dari manajemen strategis adalah:

- a. Analisis lingkungan yang diperlukan untuk mendeteksi peluang dan ancaman;
- b. Analisis profil perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan;
- c. Strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan misi.

Johnson dan Kevan (1993) mendefinisikan strategi merupakan arah dan cakupan jangka panjang yang disusun oleh organisasi untuk memperoleh keunggulan dengan memanfaatkan konfigurasi sumberdaya alam dan lingkungan sesuai kebutuhan pasar dan memenuhi harapan pihak yang berkepentingan. Manajemen strategi dilalui dengan tiga mata rantai yakni perumusan strategi

(strategic analyses), implelementasi strategi (stategic implementation) dan strategic choice (evalution). Uraian dari ketiga mata rantai tersebut adalah:

- a. Perumusan strategi, tahap ini mengenali peluang dan ancaman eksternal, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan objektif jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif dan memilih strategi untuk dilaksanakan.
- b. Implementasi strategi, tahap ini menetapkan objektif tahunan memperlengkapi kebijakan, mengalokasikan sumberdaya, mengembangkan budaya organisasi yang dapat mendukung strategi dan menciptakan struktur oganisasi yang obyektif.
- c. Evaluasi strategi, tahap ini dilakukan untuk memperoleh informasi kapan suatu strategi tidak lagi berfungsi dengan baik.

Pemerintah sebagaimana amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dalam rangka “Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan” menetapkan beberapa sasaran yaitu:

- a. Mengurangi kesenjangan sosial, ditujukan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah.
- b. Menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara signifikan.
- c. Menyediakan akses pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi yang sama bagi masyarakat.

Arah kebijakan yang disusun pemerintah antara lain:

- a. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi.
- b. Pengembangan sistem perlindungan dan jaminan sosial untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak rakyat akan pelayanan sosial dasar, terutama kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
- c. Meningkatkan peran koperasi dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
- d. Peningkatan kesempatan kerja penduduk miskin.

Pemerintah dengan Agenda Nawa Cita yang ketiga, mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah yaitu, “Membangun Indonesia dari

pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, terutama dalam:

- a. Menciptakan pertumbuhan inklusif
- b. Memperbesar investasi padat pekerja
- c. Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro
- d. Menjamin perlindungan sosial bagi pekerja informal
- e. Meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu
- f. Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian, dan
- g. Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Ketimpangan kesejahteraan masyarakat hingga saat ini masih terjadi di wilayah Indonesia. Secara kasat mata, ketimpangan kesejahteraan baik ekonomi dan sosial merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. Pelaksanaan pembangunan pada hakekatnya adalah upaya untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik secara lahir maupun batin namun kenyataan dilapangan berbeda dengan tujuan dan cita-cita pembangunan. Ketimpangan kesejahteraan masih terjadi secara masif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak membawa tingkat kesejahteraan yang merata. Kemiskinan dan pengangguran merupakan potret ketimpangan kesejahteraan yang terjadi pada level individu maupun kelompok yang sangat mudah diamati. Pada cakupan yang besar kumpulan ketimpangan kesejahteraan individu atau kelompok ini menyebabkan ketimpangan yang lebih besar yaitu ketimpangan kesejahteraan antar wilayah.

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia. Jumlah penduduk yang besar berkorelasi dengan tingkat permasalahan yang timbul didalamnya baik bidang ekonomi maupun sosial. Selain jumlah penduduk, tipologi wilayah di Jawa Timur juga dipengaruhi oleh kultur dan budaya etnis yang terdiri dari suku Jawa, Madura, Tengger, dan Osing. Etnis luar/pendatang yang juga berkembang antara lain China, Arab dan India. Potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing daerah

kabupaten/kota juga sangat beragam. Beberapa daerah telah tumbuh sebagai pusat-pusat pertumbuhan disisi lain terdapat daerah-daerah yang sulit untuk berkembang. Masih banyak daerah yang jika dilihat dari capaian kinerja pembangunan khususnya pada indikator makro belum tercapai secara optimal dan memerlukan perhatian untuk dikembangkan.

Mengacu pada beberapa fakta diatas, terdapat beberapa ukuran indikator kesejahteraan yang dapat dihitung secara matematis dan dapat dijadikan sebagai bahan pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu memahami karakteristik wilayah – wilayah yang ada didalamnya agar ada tuntunan dalam memberikan perlakuan terhadap kabupaten/kota bukan sekedar memberikan bantuan program/kegiatan kepada daerah. Ukuran – ukuran indikator kesejahteraan yang digunakan juga dapat dijadikan alat untuk melihat tingkat ketimpangan kesejahteraan antar wilayah sehingga pemerintah provinsi dapat menyusun strategi untuk perencanaan pembangunan mengatasi ketimpangan.

Setelah mempelajari beberapa variabel kesejahteraan yang tersedia pada masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur maka penelitian ini mengklasifikasikan tipologi kesejahteraan menjadi 4 dimensi yaitu:

1. Dimensi Keadilan Sosial

Dimensi keadilan sosial menyangkut upaya pemenuhan kebutuhan dasar, serta tindakan afirmatif oleh penyelenggara negara untuk melindungi dan memastikan setiap warga negara mendapatkan pemenuhan terhadap hak dasarnya.

2. Dimensi Keadilan Ekonomi

Dimensi Keadilan Ekonomi mencerminkan keadilan ekonomi yaitu bagaimana masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi.

3. Dimensi Demokrasi dan Tata Kelola

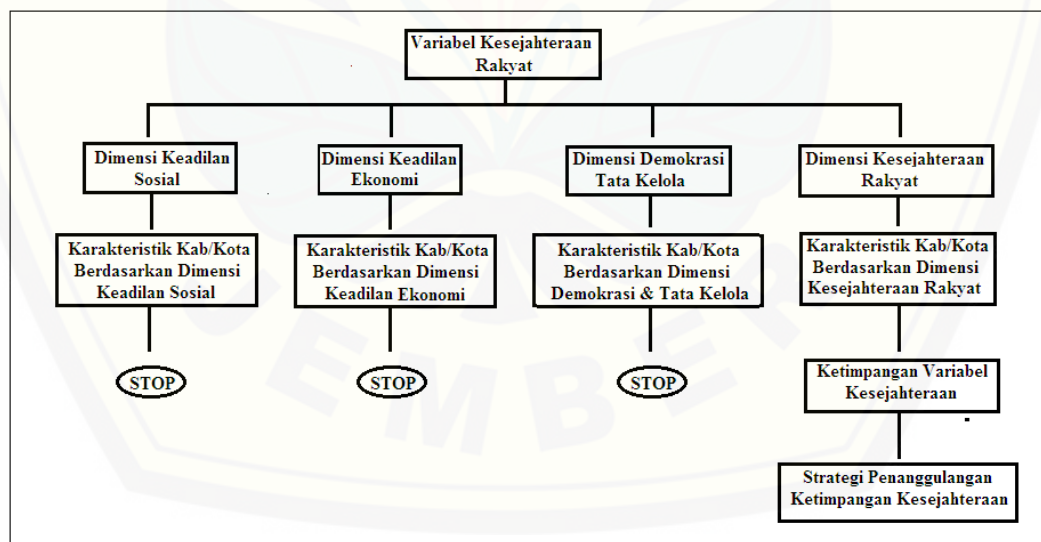
Dimensi Demokrasi dan Tata Kelola mencerminkan tercapainya hak-hak rakyat atas rasa keadilan hukum dan dihormatinya hak-hak politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan bangsa.

#### 4. Gabungan Keseluruhan Dimensi Kesejahteraan Rakyat

Keseluruhan variabel disatukan sebagai satu kesatuan ukuran kesejahteraan rakyat yang mencerminkan pemenuhan hak dasar masyarakat baik dalam ekonomi, sosial dan tata kelola pemerintahan.

Tahap berikutnya, melakukan pengolahan variabel kesejahteraan rakyat ke dalam analisis kluster. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengelompokkan kabupaten/kota di Jawa Timur menjadi dua kelompok atau lebih. Hasil dari analisis ini adalah untuk mengetahui karakteristik kelompok yang terbentuk beserta kekuatan dan kelemahan variabel pembentuk kelompok. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis deskriptif untuk menguraikan karakteristik daerah yang terbentuk berdasarkan masing-masing dimensi.

Dengan memanfaatkan hasil dari analisis kluster, dilakukan pendalaman terhadap penyebab kelemahan pada masing-masing variabel yang timpang yang selanjutnya disusun analisis strategi penanggulangan ketimpangannya. Penelitian juga didukung dengan melakukan inventarisasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.



Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian



### 2.3 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang menggunakan analisis kluster sebagai alat bantu untuk membentuk segmentasi terhadap objek yang diteliti dengan tujuan memberikan informasi tentang kelompok yang terbentuk atau dapat juga digunakan sebagai alternatif pembentukan kelompok dengan membandingkan pada standar yang sudah ada.

Rahmawati (2007), meneliti pengelompokan kabupaten/kota di Jawa Timur berdasarkan indikator kesehatan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan objek sebanyak 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dan 8 (delapan) variabel indikator kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kelompok yang diperoleh pada metode hierarki sebanyak 5 kelompok berdasar tingkat kesehatan, yaitu: kelompok dengan tingkat kesehatan sangat tinggi, kelompok dengan tingkat kesehatan tinggi, kelompok dengan tingkat kesehatan sedang, kelompok dengan tingkat kesehatan rendah dan kelompok dengan tingkat kesehatan sangat rendah.

Priambodo dan Ritonga (2014), melakukan penelitian untuk membuat model pengelompokan pemerintah daerah di Indonesia untuk memaksimalkan komparabilitas antar daerah dengan mempertimbangkan variabel-variabel sosio ekonomi yang relevan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan data dari 30 kota dan 91 kabupaten di Jawa dan Bali sebagai sampel, diperoleh 5 kelompok kota dan 3 kelompok kabupaten yang memiliki karakteristik serupa. Faktor yang paling signifikan yang membuat perbedaan antar kluster adalah dana bagi hasil pajak.

Yulianto dan Hidayatullah (2014), melakukan penelitian untuk mengelompokkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat. Dengan mengidentifikasi karakteristik tingkat kesejahteraan rakyat tiap daerah di Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat diambil kebijakan dan strategi pembangunan dapat tepat sasaran dan tepat guna. Hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa proses pengelompokan 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dibentuk tiga kelompok (kluster), dimana kelompok A beranggotakan 28 kabupaten/kota, kelompok B beranggotakan 2 kabupaten/kota dan kelompok C beranggotakan 5 kabupaten/kota.

## **BAB 3. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Penentuan Sampel dan Data Penelitian**

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh yaitu menggunakan seluruh anggota populasi sebagai sampel. Sampel yang digunakan adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kotamadya.

Pemilihan sampel mencakup seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur dengan pertimbangan bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada pertumbuhan nasional dan menjadi barometer perkembangan ekonomi secara nasional namun berdasarkan Perpres Nomor 131 Tahun 2015 hingga saat ini masih terdapat 4 (empat) kabupaten tertinggal di Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ketimpangan pembangunan di wilayah Jawa Timur.

### **3.2 Jenis, Variabel dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data yang digunakan bersumber dari berbagai data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Keuangan RI. Sedangkan data – data primer dilakukan melalui serangkaian pertemuan dengan beberapa stakeholder.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif dilaksanakan dengan pengamatan atau pengambilan data/informasi berdasarkan variabel-variabel ukuran kesejahteraan yang diasumsikan mendekati terhadap variabel penyusun Indek Kesejahteraan Rakyat (IKraR) (kemenkokesra, 2012).

Keseluruhan variabel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 14 variabel yang terdiri dari:

- a. Variabel 1 (V1): Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama.

Listrik menjadi tolok ukur yang penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan. Kecukupan akses pada listrik akan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat karena listrik menjadi sumber energi penting dalam mendukung seluruh kegiatan masyarakat.

- b. Variabel 2 (V2): Rata-rata lama sekolah penduduk usia > 25 Tahun.

Pendidikan merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki oleh suatu bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk suatu bangsa, maka kualitas bangsa tersebut juga semakin baik dalam mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki.

- c. Variabel 3 (V3): Angka Harapan Hidup (AHH).

Indikator kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan kualitas penduduk suatu bangsa. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator kesejahteraan yang banyak digunakan untuk melihat kesuksesan suatu negara dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya.

- d. Variabel 4 (V4): Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih sebagai sumber air minum.

Air merupakan sumber utama kehidupan yang tidak hanya digunakan sebagai air minum, akan tetapi juga berbagai keperluan lainnya. Air bersih yang dimaksud di sini adalah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum dari air kemasan bermerk, air isi ulang, leding meteran, leding eceran, sumur bor/pompa dengan jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat  $\geq 10$ m, sumur terlindung dengan jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat  $\geq 10$ m, atau mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat  $\geq 10$  m.

- e. Variabel 5 (V5): Persentase rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri.

Akses sanitasi dasar di Indonesia masih cukup rendah, terutama bagi masyarakat yang hidup di daerah perdesaan. Ukuran yang digunakan untuk mengukur sanitasi dasar dalam Indeks Kesejahteraan rakyat adalah kepemilikan jamban.

- f. Variabel 6 (V6): Persentase penduduk tidak miskin.  
Jumlah penduduk miskin merupakan salah satu indikator yang menunjukkan ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Seseorang dikatakan sebagai miskin apabila rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Penamaan yang digunakan pada Indikator ini adalah Pengeluaran Perkapita di atas Garis Kemiskinan.
- g. Variabel 7 (V7): Pemerataan Pendapatan.  
Pertumbuhan ekonomi tidak selalu memberikan korelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan penduduk. Permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi adalah distribusi pendapatan. Tingginya ketimpangan antar penduduk pada gilirannya akan memicu permasalahan dalam bidang ekonomi dan sosial. Gini rasio digunakan untuk mengukur pemerataan pendapatan penduduk. Semakin merata distribusi pendapatan kepada seluruh penduduk, maka ketimpangan atau kesenjangan yang dimiliki semakin rendah, demikian sebaliknya.
- h. Variabel 8 (V8): Persentase rumah tangga yang memiliki rumah sendiri.  
Kepemilikan rumah menjadi prasyarat penting untuk terpenuhinya kebutuhan sosial dasar seperti identitas, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Indikator kepemilikan rumah ini menggunakan indikator Susenas yang mengukur Persentase Penduduk/Kepala Rumah Tangga yang memiliki rumah sendiri
- i. Variabel 9 (V9): Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja.  
Ketentuan ILO (International Labour Organization) bahwa batas bawah umur seorang anak untuk diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun. Indikator penduduk yang bekerja penting mengingat dengan bekerja rakyat akan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Indikator ini juga digunakan untuk melihat tingkat pengangguran.
- j. Variabel 10 (V10): Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD.  
Indikator Rasio PAD terhadap APBD digunakan untuk melihat seberapa jauh kemampuan fiskal suatu daerah dalam melaksanakan program pembangunan

dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat. Selain itu, dapat dilihat juga apakah besarnya PAD berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan di suatu wilayah.

- k. Variabel 11 (V11): Rasio rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dengan garis kemiskinan (GK)

Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa besar pengeluaran yang dibayarkan oleh penduduk dibandingkan dengan garis kemiskinan yang ditetapkan di suatu daerah tertentu. Indikator ini juga digunakan untuk mengukur tingkat daya beli di masing-masing daerah dan juga tingkat kemahalannya. Prinsipnya apabila rasio pengeluaran lebih besar dari pada garis kemiskinan maka masyarakat lebih sejahtera. Sebaliknya, apabila pengeluarannya lebih kecil dari garis kemiskinan maka dapat diartikan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya yang dihitung dengan garis kemiskinan.

- l. Variabel 12 (V12): Persentase penerimaan sinyal dengan baik.

Indikator hak atas informasi (akses informasi) dijamin oleh UUD 1945 dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Informasi yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menciptakan dan memanfaatkan peluang-peluang dari hasil pembangunan. Keterjangkauan komunikasi tidak terlepas dari kebutuhan akan informasi. Kemudahan akses komunikasi berupa keberadaan sinyal kuat bagi telepon genggam juga telah menjangkau desa-desa di Jawa Timur (BPS, 2012).

- m. Variabel 13 (V13): Persentase Jumlah Perempuan dalam Keanggotaan DPRD Kab/kota.

Parlemen yang sensitif gender merupakan agenda strategis yang sedang didorong secara internasional. Ide dasarnya adalah pengarusutamaan gender dalam institusi pengambil kebijakan. Tujuan utamanya adalah mengintegrasikan perspektif gender dalam semua produk kebijakan sehingga menjadikan parlemen akuntabel, responsif, representatif, adil dan berkesetaraan. (<http://insanakademis.blogspot.co.id/2011/10/dinamika-representasi-perempuan-dalam.html>)

- n. Variabel 14 (V14): Persentase Tingkat Kehadiran dalam Pemilu.

Menurut Huntington dan Nelson (1994), partisipasi politik adalah kegiatan warga (pribadi) yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan oleh Pemerintah. Hak memberikan suara oleh rakyat merupakan salah satu partisipasi politik secara pribadi yang dipandang dapat mempengaruhi kebijakan politik Pemerintah khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR), kesejahteraan dibangun atas 3 dimensi yaitu dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi demokrasi dan tata kelola.

- a. Dimensi Keadilan Sosial: variabel yang diambil dalam dimensi ini selain menyangkut persoalan proses distribusi atau pemerataan, tetapi juga menyangkut upaya pemenuhan kebutuhan dasar, serta tindakan afirmatif oleh penyelenggara negara untuk melindungi dan memastikan setiap warga negara mendapatkan pemenuhan terhadap hak dasarnya. Dalam penelitian ini diambil 7 (tujuh) variabel yaitu: (1). Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama, (2). Rata-rata lama sekolah penduduk + 25 Tahun, (3). Angka Harapan Hidup (AHH), (4). Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih sebagai sumber air minum, (5). Persentase rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri, (6). Persentase penduduk tidak miskin, dan (7). Pemerataan Pendapatan.
- b. Dimensi Keadilan Ekonomi: variabel yang diambil dalam dimensi ini adalah variabel yang mencerminkan keadilan ekonomi yaitu akses masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi. Dalam penelitian ini diambil 4 (empat) variabel yaitu: (1). Persentase rumah tangga yang memiliki rumah sendiri, (2). Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, (3). Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD dan (4) Rasio rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dengan garis kemiskinan (GK).
- c. Dimensi Demokrasi dan Tata Kelola: variabel yang diambil dalam dimensi ini adalah variabel yang mencerminkan tercapainya hak-hak rakyat atas rasa keadilan hukum dan dihormatinya hak-hak politik rakyat sebagai pemegang

kedaulatan bangsa. Pengukuran variabel yang digunakan adalah kemajuan pembangunan demokrasi yang menjamin hak rakyat berpartisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan demokrasi secara mandiri tanpa diskriminasi. Penelitian ini mengambil 3 (tiga) variabel yaitu: (1). Persentase penerimaan sinyal dengan baik, (2). Persentase Jumlah Perempuan dalam keanggotaan DPRD Kab/kota, dan (3). Persentase Tingkat Kehadiran dalam Pemilu.

Pemetaan kabupaten/kota Se-Jawa Timur dilakukan menurut masing-masing dimensi untuk mengetahui karakteristik kelompok yang terbentuk dan menguraikan kelebihan dan kelemahan karakter yang terbentuk dari masing-masing kelompok. Pemetaan kabupaten/kota se-Jawa Timur juga dilakukan dengan menggunakan keseluruhan variabel sebagai satu kesatuan berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Kemudian akan diuraikan kelebihan dan kelemahan karakter yang terbentuk dari masing-masing kelompok.

Alat analisis statistik yang digunakan adalah analisis kluster yaitu teknik multivariat yang mempunyai tujuan utama untuk mengelompokkan objek-objek berdasarkan karakteristik yang dimilikinya.

Penelitian juga akan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait upaya – upaya strategis yang dapat membantu pemerintah daerah dalam mengurai kelemahan – kelemahan dari karakteristik yang muncul pada kelompok/kluster yang terbentuk. Informasi yang diharapkan adalah berupa pendapat, saran dan masukan dari segenap stakeholder yang dianggap memiliki pengetahuan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pada konsep perencanaan pembangunan serta lebih spesifik pada pemahaman tentang program dan kegiatan pembangunan. Upaya – upaya strategis akan difokuskan kepada penanganan terhadap variabel-variabel yang rendah dari karakteristik kelompok yang terbentuk.

### **3.3 Analisis Kluster**

Analisis Kluster adalah salah satu teknik analisis multivariate yang bertujuan untuk mengelompokkan set objek ke dalam suatu kelompok

berdasarkan karakteristiknya sehingga set objek yang berada dalam satu kelompok akan memiliki kesamaan yang tinggi dibandingkan dengan set objek yang berada dikelompok lain (Sharma, 1996).

Ciri-ciri klaster yang baik adalah homogenitas yang tinggi dalam klaster (*within cluster*) yaitu kesamaan yang tinggi antar anggota dalam satu klaster dan heterogenitas yang tinggi antar klaster (*between cluster*) yaitu perbedaan yang tinggi antar klaster yang satu dengan klaster yang lain.

Tahap awal dari analisis klaster adalah merumuskan masalah dengan mendefinisikan variabel-variabel yang dipergunakan untuk dasar pengklasteran, kemudian ukuran jarak yang tepat harus dipilih. Ukuran jarak menentukan kemiripan atau ketidakmiripan dari objek yang akan dikelompokkan (dimasukan dalam klaster). Pendekatan untuk melihat kemiripan antar objek biasa dinyatakan dalam jarak (*distance*). Semakin besar ukuran jarak antar objek maka semakin besar perbedaan antar objek dimaksud maka akan semakin besar kemungkinan kedua objek menjadi satu klaster. Terdapat beberapa cara dalam mengukur jarak diantaranya:

- a. Menggunakan jarak Euclidean yang dirumuskan sebagai berikut (Johnson, 1982):

$$d(y, x) = \sqrt{\sum_{k=1}^l (y_k - x_k)^2}; l = 1, 2, 3, \dots, n$$

$d(y, x)$  = kuadrat jarak Euclid antar obyek pada  $y$  dengan obyek pada  $x$ .

$y_k$  = nilai dari obyek  $y$  pada variabel ke- $k$

$x_k$  = nilai dari obyek  $x$  pada variabel ke- $k$

- b. Menggunakan jarak kuadrat *Euclidean* (*squared euclidean distance*). Jarak *Square Euclidean* merupakan ukuran kesamaan jumlah kuadrat perbedaan tanpa akar kuadrat. Formulasnya sebagai berikut (Hairet al, 1998):

$$d^2(y, x) = \sum_{k=1}^l (y_k - x_k)^2; l = 1, 2, 3, \dots, n$$

- c. *The City Block or Manhattan Distance* antara dua objek merupakan jumlah nilai perbedaan mutlak untuk tiap variabel. Jarak ini juga disebut jarak



Minkowski. Jika  $x' = (x_1, x_2, \dots, x_p)$ ,  $p$  adalah variable maka  $x'_i = (x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{ip})$  adalah kumpulan variabel pada objek ke-i.

$$d_{ij} = \left[ \sum_{k=1}^l |(y_k - x_k)^r| \right]^{1/r}$$

dengan  $d_{ij}$  = jarak antar dua obyek ke-i dan obyek ke-j

- d. Jarak Mahalanobis suatu jarak antara dua titik yang mempertimbangkan kovarian atau korelasi diantara dua variabel (Sharma, 1996). Jarak Mahalanobis antara dua sampel (X,Y) dari suatu variabel acak didefinisikan sebagai berikut (Durak, 2001)

$$d_{mahalanobis}(X, Y) = \sqrt{(x - y)^T \Sigma^{-1} (x - y)}$$

$d_{mahalanobis}(X, Y)$  = jarak mahalanobis,  $\Sigma^{-1}$  = matrik varian kovarian

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

### 3.3.1 Desain Penelitian dalam Analisis Klaster

#### a. Penentuan Sampel

Sampel yang diambil dapat mencerminkan populasi yang akan diwakili kecuali objek yang diambil merupakan populasi itu sendiri maka semua informasi yang terkait dengan objek menjadi sesuatu yang penting.

#### b. Pengujian Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya variable bebas yang memiliki kemiripan dengan variabel bebas lainnya. Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi gejala multikolinieritas diantaranya:

- 1) Menurut Gujarati (1978) gejala multikolinieritas dapat dideteksi menghitung koefisien korelasi sederhana (simple correlation) antara sesama variabel bebas, jika terdapat koefisien korelasi sederhana yang mencapai atau melebihi 0,8 maka terjadi multikolinieritas.
- 2) Gejala multikolinieritas dapat pula diketahui dari nilai VIF (Variance Inflation Faktor)

VIF =  $1 / (1 - R^2)$ . Untuk dua variabel bebas, nilai R nya dapat dihitung dengan:

$$r_{x_1x_2} = \frac{N\sum x_1x_2 - (\sum x_1)(\sum x_2)}{\sqrt{(N\sum x_1^2 - (\sum x_1)^2)(N\sum x_2^2 - (\sum x_2)^2)}}$$

Apabila nilai VIF yang diperoleh kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas antar variabel.

- 3) Gejala Multikolinieritas dapat dideteksi dengan Nilai tolerance apabila lebih besar dari 0,1 maka tidak terjadi multikolinieritas antar variabel.

c. Pendeteksian Outlier

Data outlier adalah data pencilon yang memiliki karakter berbeda dengan data yang lain secara signifikan. *Outliers* adalah obyek-obyek dengan profil-profil yang berbeda atau *value* yang berbeda dalam satu sampel atau variabel. Deteksi terhadap *univariate outlier* dapat dilakukan dengan menentukan nilai batas yang akan dikategorikan sebagai data outlier yaitu dengan cara mengkonversi nilai data ke dalam skor standardized atau yang biasa disebut *z-score*, yang memiliki nilai means (rata-rata) sama dengan nol dan standar deviasi sama dengan satu. Jika sebuah data outlier, maka nilai *z* terletak dalam selang (-2,5; +2,5). Jika data diketahui terdapat satu atau lebih data *outlier*, pada *outlier* tersebut bisa dilakukan beberapa penanganan:

- 1) Data *outlier* dihilangkan, jika data outlier tersebut didapat karena kesalahan pengambilan data, kesalahan inputing pada computer dan sebagainya.
- 2) Data *outlier* tetap dipertahankan (retensi), dan tidak perlu dihilangkan, jika tidak terdapat kesalahan pada proses sampling maupun inputing data.

d. Mengukur Kesamaan dan Standarisasi Data.

Jika terdapat perbedaan nilai yang besar antar variabel yang dapat menyebabkan bias dalam analisis kluster maka data asli perlu ditransformasi (standarisasi). Misalnya, ada yang dalam satuan juta dan ada yang satuan puluhan atau bahkan lebih kecil. Perbedaan data yang besar akan menyebabkan perhitungan jarak menjadi tidak valid.

### 3.3.2 Proses Mendapatkan Jumlah Kluster Optimum

Pemilihan terhadap metode dalam menggunakan algoritma kluster yaitu metode hirarkhi dan metode non hirarkhi. Penelitian ini menggabungkan 2 (dua) metode yaitu metode hierarki dan metode non-hierarki (*K-mean Cluster*). Dua metode ini dipilih karena belum diketahui secara pasti jumlah kluster yang akan terbentuk. Urutan tahapan analisis sebagai berikut:

- a. Menggunakan analisis kluster dengan metode hierarki dalam rangka menentukan jumlah kluster/kelompok. Prosedur hirarki yang digunakan adalah proses aglomerasi dimana pembentukan jumlah kelompok dimulai dari banyak kelompok untuk mendapatkan 1 (satu) kelompok. Dalam proses aglomerasi pembentukan kelompok dilakukan dengan metode Ward dan penerapan jarak kuadrat Euclidean (*squared euclidean distance*) sebagai ukuran jarak atau kemiripan (*similarity*). Prosedur aglomerasi dengan Metode Ward dipilih karena metode ini dapat mengkombinasikan kluster-kluster dengan jumlah kecil. Dalam metode ini jarak antara dua kluster adalah jumlah kuadrat antara dua kluster untuk seluruh variabel (Dillon & Goldstein, 1984).

$$ESS = \sum_{j=1}^k \left( \sum_{i=1}^{n_j} x_{ij}^2 - \frac{1}{n_j} \left( \sum_{i=1}^{n_j} x_{ij} \right)^2 \right)$$

Keterangan

$x_{ij}$ : Nilai objek ke- $i$  dengan  $i=1,2,3,\dots$  pada kelompok ke- $j$

$k$ : Jumlah kelompok setiap stage

$n_j$ : Jumlah kelompok ke- $i$  pada kelompok ke- $j$

- b. Langkah berikutnya adalah melakukan uji validitas kelompok untuk menentukan jumlah kelompok optimum.
  - 1) Proses penentuan jumlah kelompok optimum dapat dilakukan dengan melihat perubahan koefisien aglomerasi. Jumlah kelompok optimum diperoleh ketika terjadi *sudden jump* yaitu persentase perubahan koefisien aglomerasi yang pertama kali terjadi dalam jumlah yang besar.

- 2) Kriteria Elbow merupakan salah satu pendekatan untuk mendapatkan jumlah kelompok yang ideal. Kriteria Elbow mengkombinasikan indeks RMSSTD (*Root Mean Square Standart Deviation*) dan RS (R Square). Jumlah kelompok ideal ditentukan apabila terdapat perbedaan nilai antara RMSSTD dan RS menjadi berbanding terbalik dengan keadaan sebelumnya. RMSSTD digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan (homogeneity) data yang terdapat di dalam kelompok yang sama. Semakin kecil nilai RMSSTD semakin tinggi nilai kehomogenan kelompok yang terbentuk. RMSSTD dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$d_{(uv)w} = d \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n_c} \sum_{j=1}^{r_i} (x_{ij} - \bar{x}_i)^2}{\sum_{i=1}^{n_c} (r_i - 1)}}$$

Dimana  $x_{ij}$  = nilai objek ke-j pada kelompok i

$\bar{x}_i$  = nilai pusat kelompok ke-i

$n_c$  = banyaknya kelompok yang terbentuk

$r_i$  = banyaknya objek yang termasuk dalam kelompok i

RS digunakan untuk mengukur tingkat kesamaan atau ketidaksamaan antara kelompok jika nilai RS adalah 0 maka antar kelompok memiliki kesamaan yang kuat apabila nilai RS adalah 1 maka antar kelompok yang terbentuk memiliki perbedaan yang sangat besar.

- c. Tahap selanjutnya menggunakan analisis kluster non hirarki K-mean. Analisis kluster non hirarki memerlukan kepastian jumlah kluster yang akan dibentuk berdasarkan jumlah kluster optimum yang telah terbentuk dari tahap sebelumnya. Interpretasi terhadap kluster akan dilakukan pada metode non hirarki (k-means). Kelemahan – kelemahan pada karakteristik tiap kluster akan dijelaskan dengan menggunakan rumus rata-rata dalam sampel sebagai berikut:

$$X = \mu + Z \cdot \sigma$$

Di mana:

X = Rata-rata sampel dalam klaster

$\mu$  = Rata-rata populasi

Z = Nilai standardisasi

$\sigma$  = Standar Deviasi

### 3.4 Strategi Penanggulangan Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat

Analisis strategi penanggulangan ketimpangan kesejahteraan dilakukan dengan menelaah pada informasi atau penelitian sebelumnya yang terkait dengan penanganan ketimpangan kesejahteraan baik pada level nasional ataupun daerah. Penambahan informasi tentang Analisis *Strength, Weakness, Opportunities and Threats (SWOT)* dilakukan untuk memperkuat analisis strategi penanggulangan kemiskinan.

#### 3.4.1 Matrik SWOT

Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) merupakan alat bantu untuk menyusun sebuah perencanaan strategis yang bersifat klasik dengan memanfaatkan kerangka kerja kekuatan dan kelemahan dan peluang dan ancaman. Instrumen ini memberikan pedoman untuk mencapai hal-hal yang diinginkan dan menghindari bias dalam pengambilan keputusan. Instrumen ini memberikan cara sederhana untuk menyusun cara terbaik dalam melaksanakan sebuah strategi.

Menurut Pearce dan Robinson dalam Tono (2009), analisis SWOT merupakan identifikasi yang bersifat sistematis dan dapat menyelaraskan faktor-faktor dari lingkungan eksternal dan internal serta dapat mengarahkan dan berperan sebagai katalisator dalam proses perencanaan strategis. Analisis SWOT dilaksanakan dengan mengfokuskan pada dua hal, yaitu peluang dan ancaman serta identifikasi kekuatan dan kelemahan intern. Analisis ini didasarkan ada asumsi bahwa pada suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman.

Analisis SWOT terdiri dari empat faktor, yaitu:

- a. Strengths (kekuatan): merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri.
- b. Weakness (kelemahan): merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri.
- c. Opportunities (peluang): merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. misalnya kompetitor, kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan sekitar.
- d. Threats (ancaman): merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri.

#### **3.4.2 Pendekatan Kualitatif Matrik SWOT**

Pendekatan kualitatif matrik SWOT dikembangkan oleh Kearns (Kearns, 1992) dengan menunjukkan adanya delapan kotak yang terdiri dari 4 (empat) kotak yang berisi kotak faktor eksternal peluang, kotak faktor eksternal tantangan, kotak faktor internal kekuatan dan kotak faktor internal kelemahan. Empat kotak lainnya berisi identifikasi isu strategis yang muncul dari pertemuan factor internal dan eksternal.

Eksternal Internal	Opportunity (O) (Peluang)	Threats (T) (Ancaman)
Strength (S) (Kekuatan)	S-O Strategy Bagaimana membangun metodologi baru untuk mencapai Peluang dengan memanfaatkan kekuatan Sel A: Comparative Advantages	S-T Strategy Bagaimana menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman Sel B: Mobilization
Weakness (W) (Kelemahan)	W-O Strategy Bagaimana menghilangkan kelemahan untuk mendapatkan peluang Sel C: Divestment/Investment	W-T Strategy Bagaimana membuat strategi untuk menghindari kelemahan yang mungkin mendapatkan ancaman Sel D: Damage Control

Gambar 3.1 Tabel Pendekatan Kualitatif Matrik SWOT

Keterangan:

Sel A: *Comparative Advantages*

Sel ini merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang sehingga organisasi memiliki posisi atau kondisi yang kuat untuk mengambil kesempatan dari peluang yang ada.

Sel B: *Mobilization*

Sel ini merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Tantangan eksternal yang dihadapi diatasi dengan memobilisasi sumber daya organisasi secara efektif. Sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi digunakan untuk mengatasi ancaman dari luar.

Sel C: *Divestment/Investment*

Sel ini merupakan pertemuan antara kelemahan dan peluang yang dihadapi oleh organisasi. Dalam kondisi seperti ini organisasi dihadapkan pada beberapa pilihan yaitu: 1). melepas peluang dengan divestasi kelemahan, peluang yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk menggarapnya. 2) melaksanakan investasi dengan memanfaatkan program yang lemah menjadi kekuatan mencapai peluang,

Sel D: *Damage Control*

Sel ini merupakan pertemuan antara kelemahan dengan ancaman yang dihadapi organisasi dan dapat menimbulkan bencana bagi organisasi. Strategi diambil adalah *Damage Control* (mengendalikan kerugian) sehingga tidak menimbulkan bencana yang lebih besar bagi organisasi.





## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengklasifikasian dan identifikasi variabel kesejahteraan rakyat dengan menggunakan analisis kluster dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Provinsi Jawa Timur masih terdapat daerah-daerah yang memiliki ketimpangan kesejahteraan yang cukup tinggi (tertinggal) yang disebabkan oleh rendahnya capaian kinerja pada bidang pembangunan yaitu rata lama sekolah (pendidikan), angka harapan hidup (kesehatan), air minum dan sanitasi, angka kemiskinan, kapasitas fiskal rendah, rasio pengeluaran dengan garis kemiskinan, keterbatasan akses informasi, dan pembangunan kesetaraan gender.
2. Daerah tertinggal di Jawa Timur sebagian besar berada pada daerah – daerah di Pulau Madura dan daerah Tapal Kuda. Permasalahan-permasalahan yang timbul bukan saja berasal dari ketersediaan infrastruktur pembangunan tetapi juga disebabkan oleh paradigma berfikir, perilaku dan budaya lokal masyarakat. Strategi untuk menangani ketimpangannya juga harus melibatkan unsur budaya yaitu tokoh masyarakat dan ulama.
3. Karakteristik daerah tertinggal di Jawa Timur yaitu daerah Madura dan Tapal Kuda memiliki ketimpangan di bidang pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, kemiskinan, kapasitas fiskal, kesetaraan gender dan akses informasi dan komunikasi sehingga upaya penanggulangan ketimpangan harus disesuaikan dengan karakteristik daerah.
4. Pembangunan daerah tertinggal di Jawa Timur haruslah memperhatikan karakteristik daerah yang terbentuk.
5. Startegi penanggulangan ketimpangan kesejahteraan difokuskan kepada:
  - a. Optimalisasi pemanfaatan tehnologi untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

- b. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berpihak bagi usaha kecil dan pemberdayaan masyarakat miskin atau masyarakat marjinal.
- d. Meningkatkan penyediaan dan akses layanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur)
- e. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan politik)
- f. Merubah paradigma berpikir masyarakat tentang pendidikan, kesehatan dan lingkungan ke arah positif.
- g. Meningkatkan keterlibatan tokoh masyarakat dan agama untuk membantu penyelenggaraan pembangunan.

## 5.2 Saran

Hasil pengklasifikasian atau pemetaan wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur dengan analisis klaster dapat digunakan untuk perbaikan pelaksanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Menjadi alternatif untuk menentukan klasifikasi wilayah berdasarkan kondisi daerah.
2. Hasil identifikasi berupa kelemahan dan kelebihan pada masing-masing kelompok dapat dijadikan acuan penentuan prioritas program pembangunan dalam perencanaan pembangunan.
3. Hasil pengklasifikasian wilayah dapat menjadi informasi untuk pelaksanaan program pembangunan agar tepat sasaran sesuai kebutuhan daerah khususnya untuk program-program pembangunan yang bersifat *Top Down*.

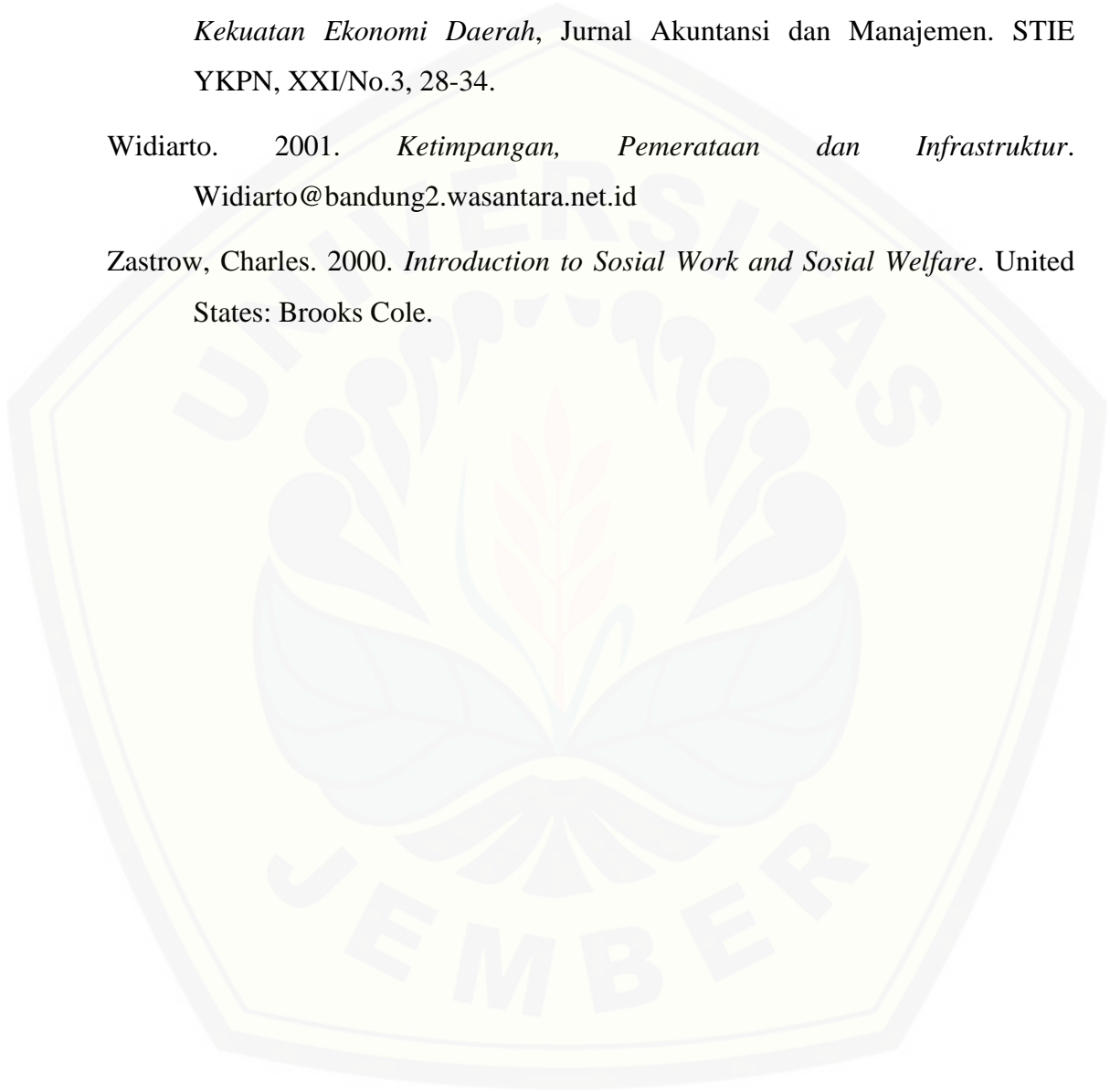
**DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, Isbandi Rukmito. 2002. *Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Sosial*. Jakarta: FE UI.
- Alvin, Y . SO, Suwarsono. 1994. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Arsyad, Lincolin, 2002. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE UGM Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2015. *Statistik Politik Jawa Timur 2014*. Surabaya: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2015. *Statistik Keamanan Jawa Timur 2014*. Surabaya: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2015. *Laporan Eksekutif Kesehatan Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Laporan Eksekutif Statistik Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Timur 2015*. Surabaya: Badan Pusat Statistik.
- Bryson, John. 2001. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dickinson, Frank G. 1970. *The Changing Position of Philanthropy in the American Economy*. United State: National Bureau of Economic Research.
- Dillon, W.R. & Goldstein, M. (1984). *Multivariate Analysis Methods and Application*. Canada: John Willey & Sons.
- Dunham, Arthur. 1958. *Community Welfare Organization Principles & Techniques (Practices)*. New York: Crowell Company.

- Hartono, Budiantoro. 2008. *Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Huntington, Samuel P. dan Nelson, Joan. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Heru Sukoco, Dwi. 1995. *Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya*. Bandung: Koperasi Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS).
- Jhingan M.L, 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Penerjemah: D. Guritno. Edisi Pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Johnson, G and S. Kevan, 1993. *Exploring Corporate Strategy: Text and Cases*. Third Edition. London: Prentice Hall.
- Johnson, R.A dan D.W. Winchern. 2002. *Applied Multivariate Statistical Analysis*. Fifth Ed. New Jersey: Prentice Hall International Inc.
- Kearns, Kevin P. 1992. *From Comparative Advantage to Damage Control. Clarifying Strategic Issues Using SWOT Analysis*. Jossey Bass: Non Profit Management and Leadership, Vol 3, No.1, Fall 1992.
- Kemerkokesra RI. 2012. *Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR)*. Buku 1. Jakarta
- Kemerkokesra RI. 2012. *Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR)*. Buku 2. Jakarta
- Kuncoro, M. 2003. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Edisi ke-3. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Mar'iyah, Chusnul. 2005. *Transisi Demokrasi dan Konsolidasi: Peran Negara dan Peluang Gerakan Perempuan*. Jurnal Analisa Sosial 6 No 1. 1411-0014.
- McNicholas, T.J, 1977. *Executive Policy and Strategic Planning*. New York: McGraw Hill.

- Muhidin, Syarif, Drs. Msc. 1992. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
- Nasikun, Dr. 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Nurhamni. 2009. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Perempuan Beraktivitas Dalam Partai Politik*. Jurnal Academica. Fisip Untad. Vol. I 2009
- O'Connell, John F. 1982. *Welfare Economic Theory*. Boston: Auburn House Publishing.
- Prawirohardjo, Sarwono., (2005). *Ilmu Kebidanan*. Jakarta : Yayasan Bina Pustaka.
- Rogers, E. M. (1983). *Diffusion of Innovations*. New York: A Division of Macmillan Publishing Co. Inc.
- Rosyidi, Suherman. (2009). *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salusu, J. 1996. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non-profi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Santoso, S. 2004. *Buku Latihan SPSS Statistik Multivariat*. Jakarta:PT Elex Media Komputindo.
- Sharma, Subhas. 1996. *Applied Multivariate Techniques*. New York: John Wileyand Sons Inc.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Reflika Aditama.
- Sunaryo, Tarcisius. 2000. *Teori Kesejahteraan Pertama*. Scripta Economica. Vol. 3 No.2 Agustus.
- Suwarsono. 1994. *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: Akademi Perusahaan Managemen, YKPN.

- Tono. 2009. *Analisis Kemiskinan Di Pedesaan Dan Strategi Penanggulangannya: Studi Kasus Di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten*. Tesis. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Widayat, Wahyu. 1994. *Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai Kekuatan Ekonomi Daerah*, Jurnal Akuntansi dan Manajemen. STIE YKPN, XXI/No.3, 28-34.
- Widiarto. 2001. *Ketimpangan, Pemerataan dan Infrastruktur*. Widiarto@bandung2.wasantara.net.id
- Zastrow, Charles. 2000. *Introduction to Sosial Work and Sosial Welfare*. United States: Brooks Cole.



## Lampiran 1. Statistik Deskriptif Variabel Kesejahteraan

**Descriptives**

[DataSet1] J:\tesis\data tesis 19 mei 2016 2.sav

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
bkj	38	92.34	98.99	95.7753	1.64980	2.722
listrik	38	98.68	100.00	99.7524	.35446	.126
jmb	38	25.14	90.75	69.6595	15.83555	250.765
gini	38	.61	.77	.7003	.03568	.001
rmh	38	51.18	97.23	86.8687	10.49715	110.190
air	38	46.43	98.86	74.6642	12.94940	167.687
rls	38	3.49	10.90	7.2918	1.72131	2.963
ahh	38	65.43	73.85	70.7279	2.11151	4.458
pad	38	6.24	50.83	12.6576	8.84493	78.233
dprd	38	.00	51.52	18.2521	10.79421	116.515
sny	38	61.40	100.00	86.8237	10.02934	100.588
vtr	38	60.53	94.90	77.0321	6.50953	42.374
nmsk	38	74.20	95.41	87.9037	4.99263	24.926
rsokpt	38	2.04	3.60	2.8313	.37555	.141
Valid N (listwise)	38					

## Lampiran 2. Analisis Kluster pada Dimensi Keadilan Sosial

**Quick Cluster**

[DataSet1] J:\tesis\data tesis 19 mei 2016 2.sav

**Initial Cluster Centers**

	Cluster		
	1	2	3
Zscore: listrik	-2.34829	-3.02538	.69862
Zscore: rls	-1.29078	-1.02936	2.09617
Zscore: ahh	-.52469	-2.50905	.79663
Zscore: air	-.99342	-1.40657	1.19201
Zscore: jmb	.36251	-2.81136	.85633
Zscore: nmsk	-2.05977	-.53352	1.44940
Zscore: gini	-.84824	.83348	-1.12852

**Iteration History<sup>a</sup>**

Iteration	Change in Cluster Centers		
	1	2	3
1	2.970	1.600	2.181
2	.459	.478	.138
3	.169	.000	.088
4	.329	.547	.000
5	.362	.451	.000
6	.281	.000	.164
7	.120	.000	.081
8	.204	.000	.176
9	.124	.000	.121
10	.079	.000	.093



Iteration History<sup>a</sup>

Iteration	Change in Cluster Centers		
	1	2	3
1	2.970	1.600	2.181
2	.459	.478	.138
3	.169	.000	.088
4	.329	.547	.000
5	.362	.451	.000
6	.281	.000	.164
7	.120	.000	.081
8	.204	.000	.176
9	.124	.000	.121
10	.079	.000	.093

a. Iterations stopped because the maximum number of iterations was performed. Iterations failed to converge. The maximum absolute coordinate change for any center is .073. The current iteration is 10. The minimum distance between initial centers is 4.457.

Cluster Membership

Case Number	kabkota	Cluster	Distance
1	Kab. Bangkalan	2	2.764
2	Kab. Banyuwang	1	1.136
3	Kab. Blitar	1	1.258
4	Kab. Bojonegor	1	.979
5	Kab. Bondowoso	2	2.289
6	Kab. Gresik	3	1.851
7	Kab. Jember	2	1.864
8	Kab. Jombang	1	1.307
9	Kab. Kediri	1	1.126
10	Kab. Lamongan	1	1.281
11	Kab. Lumajang	1	1.909

Case Number	kabkota	Cluster	Distance
12	Kab. Madiun	1	.592
13	Kab. Magetan	3	1.281
14	Kab. Malang	3	1.508
15	Kab. Mojokerto	1	1.207
16	Kab. Nganjuk	1	.692
17	Kab. Ngawi	1	1.685
18	Kab. Pacitan	1	1.835
19	Kab. Pamekasan	1	2.893
20	Kab. Pasuruan	1	1.422
21	Kab. Ponorogo	1	1.187
22	Kab. Proboling	2	1.774
23	Kab. Sampang	2	2.707
24	Kab. Sidoarjo	3	1.378
25	Kab. Situbondo	2	2.294
26	Kab. Sumenep	2	1.563
27	Kab. Trenggale	1	1.958
28	Kab. Tuban	1	1.608
29	Kab. Tulungagu	3	1.598
30	Kota Batu	3	1.909
31	Kota Blitar	3	1.946
32	Kota Kediri	3	2.424
33	Kota Madiun	3	1.539
34	Kota Malang	3	1.643
35	Kota Mojokerto	3	.944
36	Kota Pasuruan	3	1.059
37	Kota Proboling	3	1.662
38	Kota Surabaya	3	2.791

**Final Cluster Centers**

	Cluster		
	1	2	3
Zscore: listrik	.33850	-1.76389	.47091
Zscore: rls	-.30658	-1.27667	1.01062
Zscore: ahh	-.01070	-1.41505	.72052
Zscore: air	-.16359	-.86799	.63263
Zscore: jmb	.11697	-1.57445	.64519
Zscore: nmsk	-.20056	-1.24829	.86768
Zscore: gini	.32237	.59324	-.68807

**Distances between Final Cluster Centers**

Cluster	1	2	3
1		3.444	2.316
2	3.444		5.299
3	2.316	5.299	

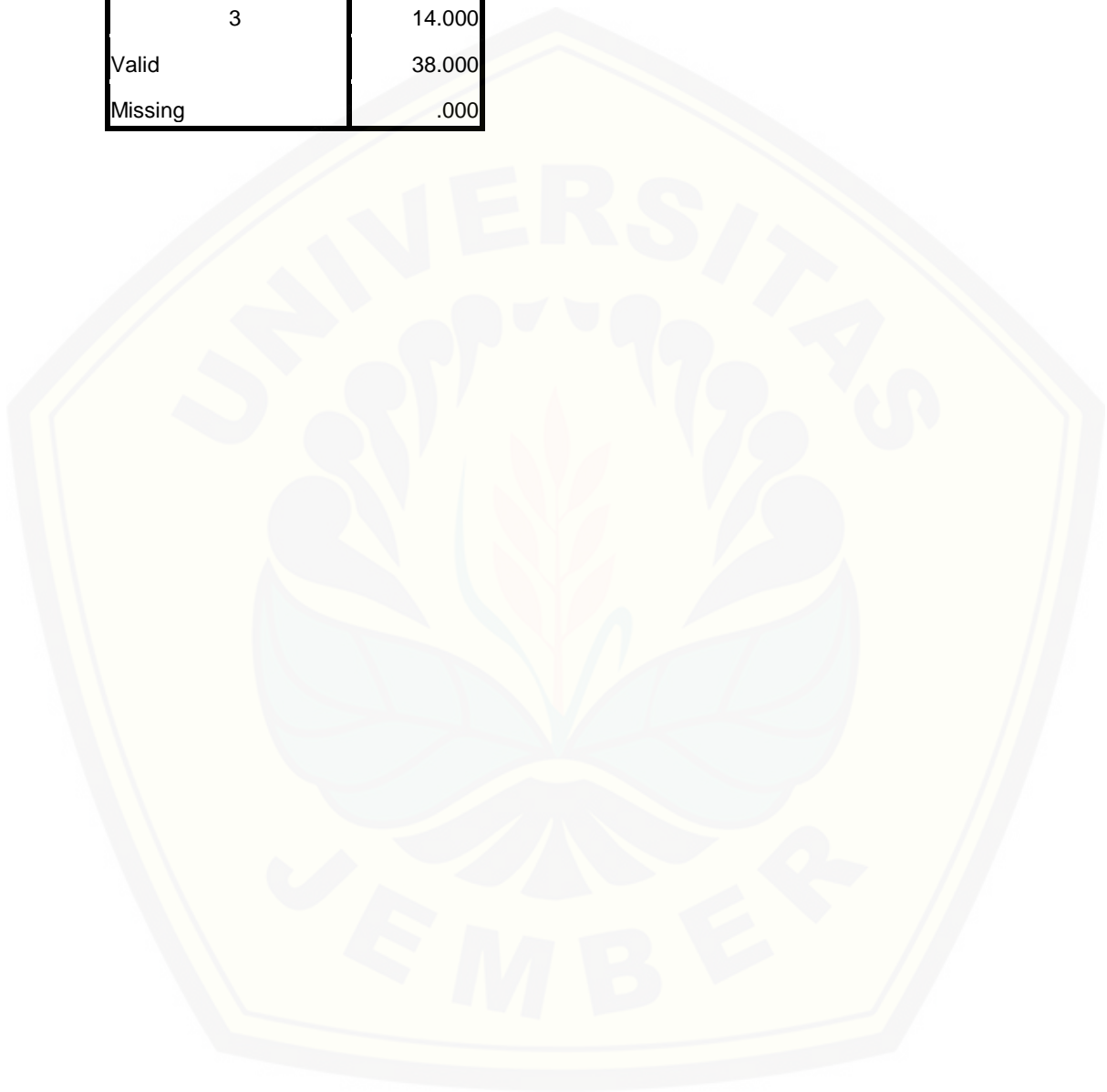
**ANOVA**

	Cluster		Error		F	Sig.
	Mean Square	df	Mean Square	df		
Zscore: listrik	13.416	2	.291	35	46.179	.000
Zscore: rls	13.653	2	.277	35	49.294	.000
Zscore: ahh	10.643	2	.449	35	23.707	.000
Zscore: air	5.666	2	.733	35	7.726	.002
Zscore: jmb	11.706	2	.388	35	30.155	.000
Zscore: nmsk	11.066	2	.425	35	26.049	.000
Zscore: gini	5.429	2	.747	35	7.269	.002

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to maximize the differences among cases in different clusters. The observed significance levels are not corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are equal.

**Number of Cases in each Cluster**

Cluster	1	17.000
	2	7.000
	3	14.000
Valid		38.000
Missing		.000



Lampiran 3. Analisis Kluster pada Dimensi Keadilan Ekonomi

**Quick Cluster**

[DataSet1] J:\tesis\data tesis 19 mei 2016 2.sav

**Initial Cluster Centers**

	Cluster		
	1	2	3
Zscore: rmh	-2.36147	-3.39985	.97182
Zscore: bkj	-1.63975	-.96694	1.90614
Zscore: pad	-.20889	4.31573	-.72218
Zscore: rsokpt	2.04682	1.19473	.15626

**Iteration History<sup>a</sup>**

Iteration	Change in Cluster Centers		
	1	2	3
1	1.913	1.649	1.727
2	.000	.000	.000

a. Convergence achieved due to no or small change in cluster centers. The maximum absolute coordinate change for any center is .000. The current iteration is 2. The minimum distance between initial centers is 4.768.

**Cluster Membership**

Case Number	kabkota	Cluster	Distance
1	Kab. Bangkalan	3	2.269
2	Kab. Banyuwang	1	1.380
3	Kab. Blitar	3	1.203
4	Kab. Bojonegor	3	.383
5	Kab. Bondowoso	3	.759

Case Number	kabkota	Cluster	Distance
6	Kab. Gresik	3	2.538
7	Kab. Jember	3	1.090
8	Kab. Jombang	3	.598
9	Kab. Kediri	3	1.474
10	Kab. Lamongan	3	.458
11	Kab. Lumajang	3	.690
12	Kab. Madiun	3	1.689
13	Kab. Magetan	3	1.752
14	Kab. Malang	3	.898
15	Kab. Mojokerto	3	1.482
16	Kab. Nganjuk	3	.673
17	Kab. Ngawi	1	1.883
18	Kab. Pacitan	3	1.727
19	Kab. Pamekasan	3	1.460
20	Kab. Pasuruan	3	1.057
21	Kab. Ponorogo	3	.383
22	Kab. Proboling	3	1.540
23	Kab. Sampang	3	1.381
24	Kab. Sidoarjo	2	1.649
25	Kab. Situbondo	3	.566
26	Kab. Sumenep	3	2.138
27	Kab. Trenggale	3	.542
28	Kab. Tuban	3	.634
29	Kab. Tulungagu	3	.778
30	Kota Batu	3	1.169
31	Kota Blitar	1	.504
32	Kota Kediri	1	2.047
33	Kota Madiun	1	1.913
34	Kota Malang	1	1.714
35	Kota Mojokerto	1	1.243
36	Kota Pasuruan	1	.591

Case Number	kabkota	Cluster	Distance
37	Kota Proboling	3	2.003
38	Kota Surabaya	2	1.649

Final Cluster Centers

	Cluster		
	1	2	3
Zscore: rmh	-1.02027	-2.18237	.44739
Zscore: bkj	-1.28895	-.37899	.39534
Zscore: pad	-.04990	3.42766	-.23057
Zscore: rsokpt	.73874	.87520	-.27358

Distances between Final Cluster Centers

Cluster	1	2	3
1		3.780	2.459
2	3.780		4.714
3	2.459	4.714	

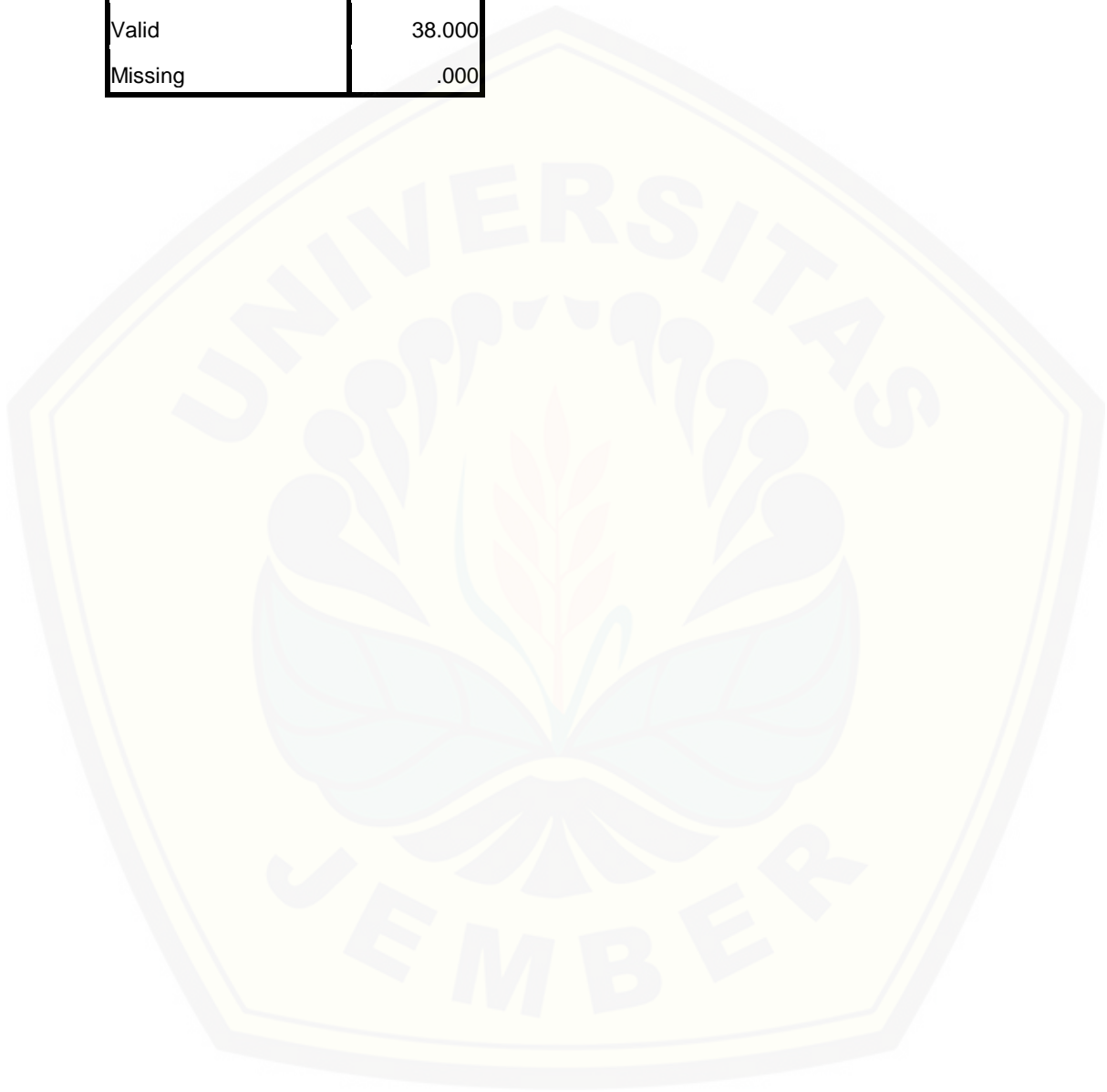
ANOVA

	Cluster		Error		F	Sig.
	Mean Square	df	Mean Square	df		
Zscore: rmh	11.729	2	.387	35	30.313	.000
Zscore: bkj	8.977	2	.544	35	16.498	.000
Zscore: pad	12.503	2	.343	35	36.486	.000
Zscore: rsokpt	3.997	2	.829	35	4.823	.014

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to maximize the differences among cases in different clusters. The observed significance levels are not corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are equal.

**Number of Cases in each Cluster**

Cluster	1	8.000
	2	2.000
	3	28.000
Valid		38.000
Missing		.000





## Lampiran 4. Analisis Kluster pada Dimensi Demokrasi dan Tata Kelola

**Quick Cluster**

[DataSet1] J:\tesis\data tesis 19 mei 2016 2.sav

**Initial Cluster Centers**

	Cluster			
	1	2	3	4
Zscore: sny	-.77709	-2.53493	1.31378	1.31378
Zscore: dprd	-1.48062	-.05578	3.08201	-1.37130
Zscore: vtr	2.74488	-.81298	-2.53507	.49894

**Iteration History<sup>a</sup>**

Iteration	Change in Cluster Centers			
	1	2	3	4
1	1.029	1.314	1.201	1.712
2	.486	.244	.000	.150
3	.000	.000	.000	.000

a. Convergence achieved due to no or small change in cluster centers. The maximum absolute coordinate change for any center is .000. The current iteration is 3. The minimum distance between initial centers is 3.070.

**Cluster Membership**

Case Number	kabkota	Cluster	Distance
1	Kab. Bangkalan	1	.539
2	Kab. Banyuwang	4	1.374
3	Kab. Blitar	4	.579
4	Kab. Bojonegor	4	.733
5	Kab. Bondowoso	1	1.315
6	Kab. Gresik	4	.628
7	Kab. Jember	2	1.428
8	Kab. Jombang	4	1.222

Case Number	kabkota	Cluster	Distance
9	Kab. Kediri	4	1.327
10	Kab. Lamongan	4	.839
11	Kab. Lumajang	2	.643
12	Kab. Madiun	4	1.196
13	Kab. Magetan	4	.891
14	Kab. Malang	4	1.649
15	Kab. Mojokerto	2	1.256
16	Kab. Nganjuk	4	.710
17	Kab. Ngawi	2	.953
18	Kab. Pacitan	2	1.523
19	Kab. Pamekasan	1	.423
20	Kab. Pasuruan	2	.809
21	Kab. Ponorogo	4	1.075
22	Kab. Proboling	2	1.175
23	Kab. Sampang	1	1.081
24	Kab. Sidoarjo	4	.618
25	Kab. Situbondo	2	.934
26	Kab. Sumenep	2	1.294
27	Kab. Trenggale	2	.580
28	Kab. Tuban	4	.855
29	Kab. Tulungagu	4	.536
30	Kota Batu	4	1.337
31	Kota Blitar	4	1.004
32	Kota Kediri	4	1.306
33	Kota Madiun	3	1.201
34	Kota Malang	4	1.495
35	Kota Mojokerto	4	1.866
36	Kota Pasuruan	4	1.745
37	Kota Proboling	4	1.016
38	Kota Surabaya	3	1.201

Final Cluster Centers

	Cluster			
	1	2	3	4
Zscore: sny	-.71253	-1.17841	1.31378	.54576
Zscore: dprd	-1.53319	-.02604	2.37978	.07426
Zscore: vtr	1.66685	-.12061	-1.56111	-.10632

Distances between Final Cluster Centers

Cluster	1	2	3	4
1		2.384	5.462	2.704
2	2.384		3.752	1.727
3	5.462	3.752		2.832
4	2.704	1.727	2.832	

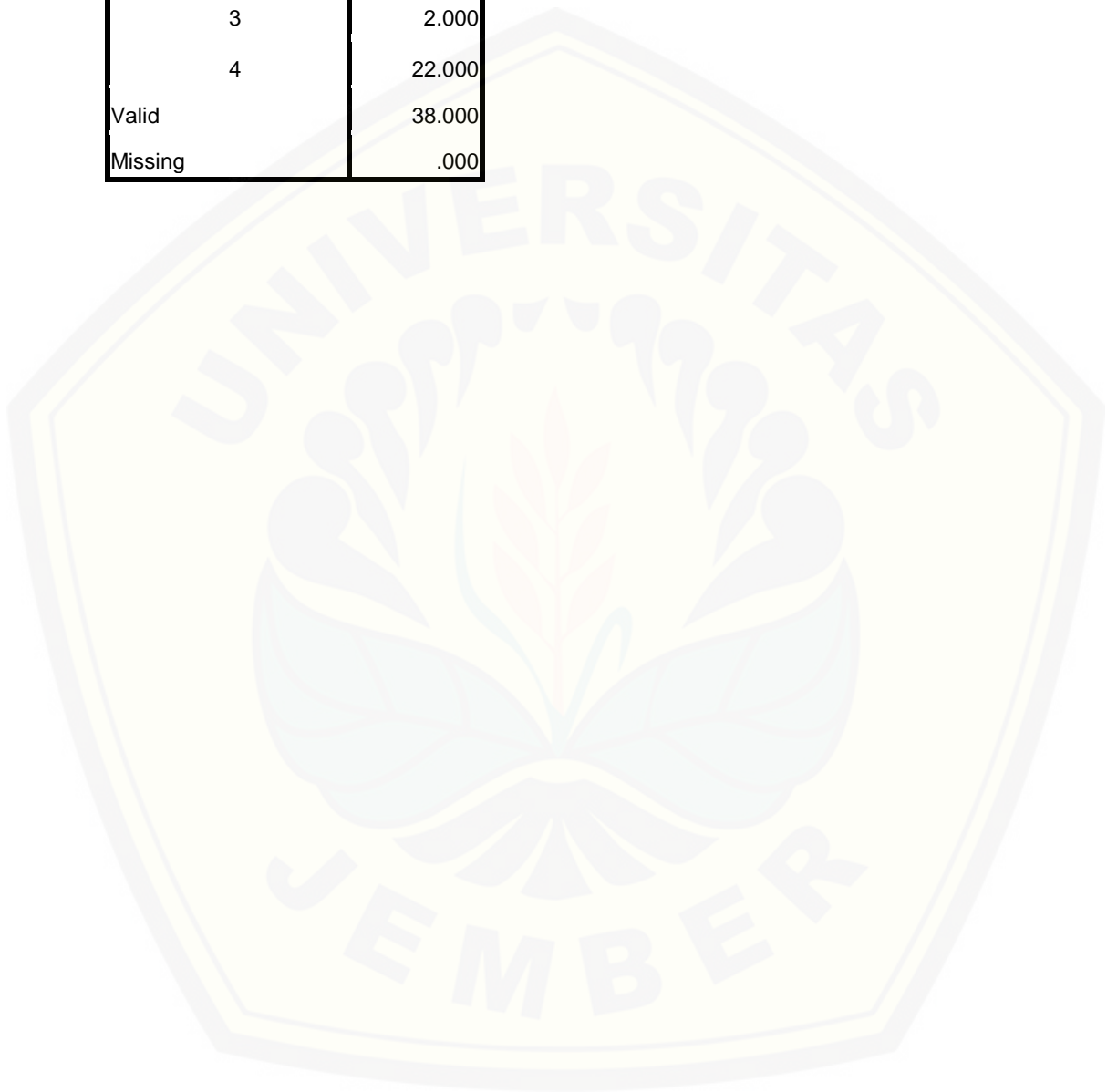
ANOVA

	Cluster		Error		F	Sig.
	Mean Square	df	Mean Square	df		
Zscore: sny	8.641	3	.326	34	26.520	.000
Zscore: dprd	6.953	3	.475	34	14.644	.000
Zscore: vtr	5.461	3	.606	34	9.005	.000

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to maximize the differences among cases in different clusters. The observed significance levels are not corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are equal.

**Number of Cases in each Cluster**

Cluster	1	4.000
	2	10.000
	3	2.000
	4	22.000
Valid		38.000
Missing		.000



## Lampiran 5. Analisis Kluster pada Dimensi Kesejahteraan (Gabungan)

**Quick Cluster**

[DataSet1] J:\tesis\data tesis 19 mei 2016 2.sav

**Initial Cluster Centers**

	Cluster		
	1	2	3
Zscore: bkj	1.21514	1.90614	-.96694
Zscore: listrik	-.42986	-.40165	-.51450
Zscore: jmb	-1.25158	1.08367	-.12374
Zscore: gini	1.95463	-.28766	-2.52996
Zscore: rmh	.02585	.97182	-3.39985
Zscore: air	-.18489	-1.23204	1.85922
Zscore: rls	-2.20869	-.50069	1.61398
Zscore: ahh	-1.53818	.01047	1.47861
Zscore: pad	-.67243	-.72218	4.31573
Zscore: dprd	-1.48062	-.05578	3.08201
Zscore: sny	-.77709	-2.53493	1.31378
Zscore: vtr	2.74488	-.81298	-2.53507
Zscore: nmsk	-2.74478	-.81794	1.26312
Zscore: rsokpt	-1.20174	.15626	1.19473

**Iteration History<sup>a</sup>**

Iteration	Change in Cluster Centers		
	1	2	3
1	2.792	3.970	3.946
2	.782	.281	.000
3	.000	.000	.000

a. Convergence achieved due to no or small change in cluster centers. The maximum absolute coordinate change for any center is .000. The current iteration is 3. The minimum distance between initial centers is 6.450.

Cluster Membership

Case Number	kabkota	Cluster	Distance
1	Kab. Bangkalan	1	3.807
2	Kab. Banyuwang	2	2.605
3	Kab. Blitar	2	1.634
4	Kab. Bojonegor	2	1.987
5	Kab. Bondowoso	1	2.751
6	Kab. Gresik	2	2.952
7	Kab. Jember	1	3.490
8	Kab. Jombang	2	1.494
9	Kab. Kediri	2	1.746
10	Kab. Lamongan	2	1.725
11	Kab. Lumajang	2	2.946
12	Kab. Madiun	2	2.085
13	Kab. Magetan	2	2.184
14	Kab. Malang	2	2.062
15	Kab. Mojokerto	2	2.005
16	Kab. Nganjuk	2	.986
17	Kab. Ngawi	2	2.712
18	Kab. Pacitan	2	4.069
19	Kab. Pamekasan	1	3.250
20	Kab. Pasuruan	2	2.534
21	Kab. Ponorogo	2	1.251
22	Kab. Proboling	1	2.722
23	Kab. Sampang	1	3.327
24	Kab. Sidoarjo	3	2.946
25	Kab. Situbondo	1	2.741
26	Kab. Sumenep	1	2.439
27	Kab. Trenggale	2	2.432
28	Kab. Tuban	2	2.497
29	Kab. Tulungagu	2	1.765

Case Number	kabkota	Cluster	Distance
30	Kota Batu	2	3.427
31	Kota Blitar	2	3.203
32	Kota Kediri	2	4.151
33	Kota Madiun	3	2.582
34	Kota Malang	3	1.860
35	Kota Mojokerto	2	3.166
36	Kota Pasuruan	2	2.887
37	Kota Proboling	2	3.007
38	Kota Surabaya	3	3.946

**Final Cluster Centers**

	Cluster		
	1	2	3
Zscore: bkj	.66432	-.04236	-1.05332
Zscore: listrik	-1.45608	.38720	.39534
Zscore: jmb	-1.47908	.37815	.50017
Zscore: gini	.65831	.01418	-1.40881
Zscore: rmh	.46132	.19758	-2.20690
Zscore: air	-.61049	-.02088	1.35669
Zscore: rls	-1.23124	.11378	1.72290
Zscore: ahh	-1.48490	.29153	1.07487
Zscore: pad	-.48518	-.14371	1.90447
Zscore: dprd	-.77306	.06123	1.14811
Zscore: sny	-1.05004	.13412	1.22828
Zscore: vtr	.80907	-.05728	-1.24581
Zscore: nmsk	-1.23355	.17514	1.32872
Zscore: rsokpt	-1.11187	.14192	1.30124

Distances between Final Cluster Centers

Cluster	1	2	3
1		4.435	8.488
2	4.435		4.960
3	8.488	4.960	

ANOVA

	Cluster		Error		F	Sig.
	Mean Square	df	Mean Square	df		
Zscore: bkj	4.008	2	.828	35	4.839	.014
Zscore: listrik	10.742	2	.443	35	24.233	.000
Zscore: jmb	11.110	2	.422	35	26.309	.000
Zscore: gini	5.706	2	.731	35	7.804	.002
Zscore: rmh	11.100	2	.423	35	26.248	.000
Zscore: air	5.178	2	.761	35	6.801	.003
Zscore: rls	12.169	2	.362	35	33.636	.000
Zscore: ahh	12.235	2	.358	35	34.178	.000
Zscore: pad	8.464	2	.573	35	14.759	.000
Zscore: dprd	5.076	2	.767	35	6.616	.004
Zscore: sny	7.661	2	.619	35	12.370	.000
Zscore: vtr	5.765	2	.728	35	7.922	.001
Zscore: nmsk	10.016	2	.485	35	20.662	.000
Zscore: rsokpt	8.593	2	.566	35	15.180	.000

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to maximize the differences among cases in different clusters. The observed significance levels are not corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are equal.



**Number of Cases in each Cluster**

Cluster	1	8.000
	2	26.000
	3	4.000
Valid		38.000
Missing		.000

